

2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJiP)**

**KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2025 - 2029, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Gambut, 23 Februari 2026
Camat Gambut



Ahmad Fauzan, S.STP, M.Si.
NIP. 19801125 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	1
A.1 Maksud Laporan.....	1
A.2 Tujuan Laporan.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
B.1 Tugas Pokok.....	1
B.2 Fungsi.....	1
B.3 Dasar Hukum.....	2
B.4 Struktur Organisasi	3
B.5 Kepegawaian.....	4
C. ISU STRATEGIS	5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. TUJUAN KECAMATAN GAMBUT	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
C. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tujuan Perangkat Daerah	26
A.2 Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025	27
A.3 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya	56
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Akhir Renstra 2025-2029	63
A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional.....	70
A.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran	76
A.7 ANALISA EFISIENSI.....	109
A.8 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	114
A.9 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2025	145
B. REALISASI ANGGARAN.....	150
BAB IV PENUTUP.....	160
A. KESIMPULAN	160
B. SARAN-SARAN	160
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Data Pegawai Kecamatan Gambut Tahun 2025	4
Tabel 1 2 Isu Strategis Kecamatan Gambut	7
Tabel 2 1 Tujuan Kecamatan Gambut.....	9
Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2025	11
Tabel 2 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025.....	14
Tabel 3 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	26
Tabel 3 2 Realisasi Tujuan Kecamatan Gambut Tahun 2025.....	26
Tabel 3 3 Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel 3 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	57
Tabel 3 5 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra 2025-2029.....	64
Tabel 3 6 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional	71
Tabel 3 7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	109
Tabel 3 8 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat	149
Tabel 3 9 Realisasi Jenis Belanja	150
Tabel 3 10 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gambut.....	151
Tabel 3 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Gambut.....	4
--	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2025 - 2029 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2025 belum berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil** dengan capaian kinerja :

1. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 memiliki target sebesar 95 dengan realisasi sebesar 89,02 dan perolehan capaian sebesar 93,71%.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan Tahun 2025 memiliki target sebesar 97 dengan realisasi sebesar 95,42 dan perolehan capaian sebesar 98,37%.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 memiliki target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 76,82 dan perolehan capaian sebesar 96,03%.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Gambut berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Gambut adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 7.113.938.340,-	100%
APBP-P	Rp. 7.265.730.340,-	102,13%

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025	(%)	REALISASI TAHUN 2024
BELANJA DAERAH	7,265,730,340	6,819,682,274	93.86	6,030,477,405
BELANJA OPERASI	6,136,358,340	5,715,571,079	93.14	5,523,431,405
Belanja Pegawai	3,782,550,000	3,490,574,201	92.28	3,779,579,665
Belanja Barang dan Jasa	2,353,808,340	2,224,996,878	94.53	1,743,851,740
BELANJA MODAL	1,129,372,000	1,104,111,195	97.76	507,046,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573,248,000	556,900,895	97.15	126,366,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223,572,000	216,431,000	96.81	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	332,552,000	330,779,300	99.47	380,680,000
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7,265,730,340)	(6,819,682,274)	93.86	(6,030,477,405)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Gambut;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Gambut;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Gambut.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

B.1 Tugas Pokok

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu "*Menangani Sebagian Unsur Otonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Tertentu*".

B.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

B.3 Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran

- daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
 11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; dan
 14. Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar Nomor 031 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan gambut Kabupaten Banjar.

B.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

a. Kecamatan

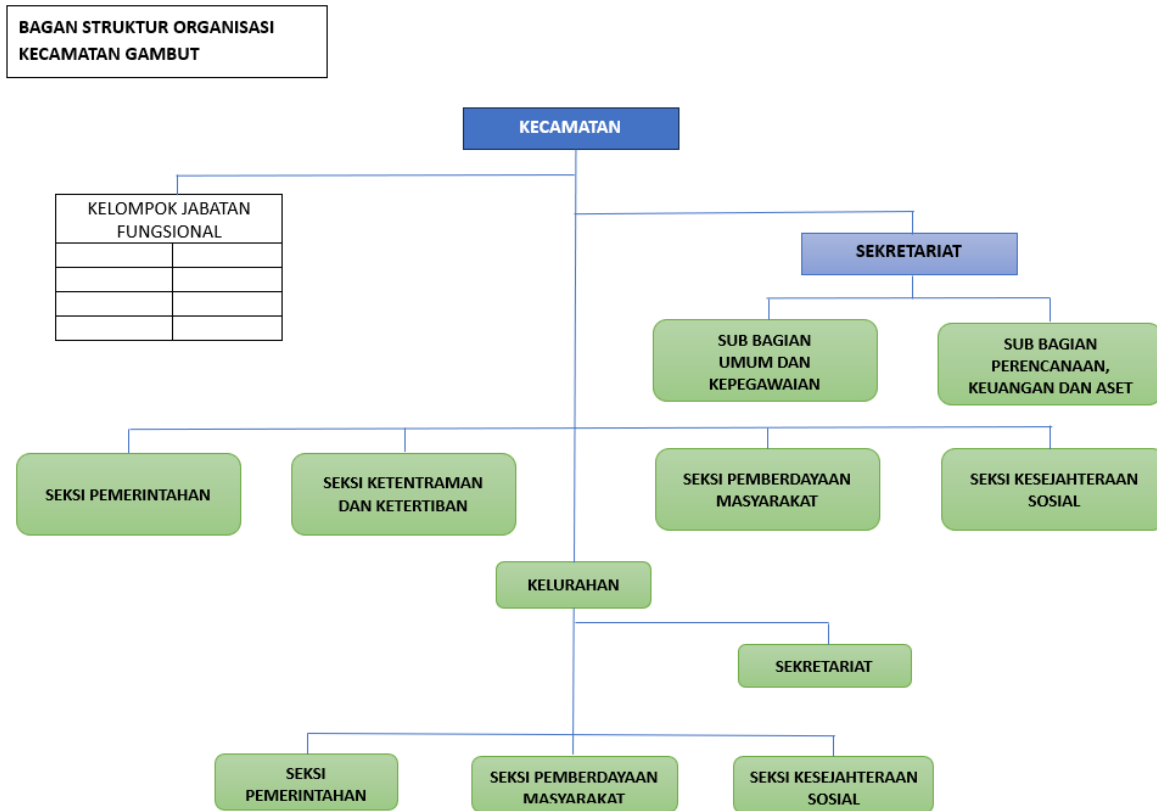
1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional

b. Kelurahan

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan

3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Gambut

B.5 Kepegawaian

Dalam menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Gambut Tahun 2025, Kecamatan memiliki Sumber daya Manusia atau kepegawaian sebanyak 34 orang ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 1 Data Pegawai Kecamatan Gambut Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL
1	AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si	CAMAT	PNS	L	PEMBINA (IV/b)
2	RAMDANI, S.AP, M.A	SEKRETARIS CAMAT	PNS	L	PEMBINA (IV/a)
3	ZURKANI, S.Sos	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PNS	L	PENATA TK. I (III/d)
4	ERMA MAULIDA, S.Sos.I	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PNS	P	PENATA TK. I (III/d)
5	AKHMAD SYAUKANI, SE.,M.A	LURAH GAMBUT	PNS	L	PENATA TK.I (III/d)
6	SUKRAN MA'MUN, SKM	LURAH GAMBUT BARAT	PNS	L	PENATA (III/c)

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL
7	YULIANTI, S.Kom, M.A	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PNS	P	PENATA (III/c)
8	JAKA UMBARA, S.Ak	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	PNS	L	PENATA MUDA TK.I (III/b)
9	ADI MULYADI, SE	SEKRETARIAT KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	L	PENGATUR MUDA TK.I (III/b)
10	RIA RAHNISA, SE	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN GAMBUT	PNS	P	PENATA TK.I (III/d)
11	RAKHMAWATI, S.Sos	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	P	PENATA MUDA TK.I (III/b)
12	MASLIANA, S.Kom, M.A	KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	P	PENATA (III/c)
13	SITI SALMAH, S.Pi	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	P	PENATA (III/c)
14	TAMTINAH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN GAMBUT	PNS	P	PENATA MUDA TK. I (III/b)
15	RAKHMAT HIDAYAT	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENATA MUDA (III/a)
16	HAIRUDIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR (II/c)
17	AHMAD HUSIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR (II/c)
18	MURSIDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)
19	M. ARSYAD	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	GOLONGAN IX
20	LINDAWATI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	P	PENATA MUDA TK. I (III/b)
21	DARMAWATI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	P	PENATA MUDA TK. I (III/b)
22	MAWARDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN GAMBUT BARAT	PNS	P	PENATA MUDA (III/a)
23	ERMILIA SUSANA, S.Si	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK	P	-
24	BAHRUL HADI, S.Pd.I	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
25	MARIYA ULFAH, S.Sos.I	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
26	NURI FIRNIDA, S.AP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
27	ALFIAN HIDAYAT, SM	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
28	MARIYANI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
29	MUHAMMAD HUSAINI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
30	IRMA NURLATIFAH, S.AP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
31	INDERA WAHYUDI, SE	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
32	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Pd	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
33	FAISAL RAHMAN, S.Pd.I	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
34	SITI KHADIJAH, S.Gz	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-

C. ISU STRATEGIS

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik Kecamatan Gambut, upaya untuk **"meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan melayani"** menjadi isu

strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal penting yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara pemerintah dan warga, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun dalam penyusunan program pembangunan yang partisipatif.

Peningkatan tata kelola yang akuntabel dan melayani dapat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, seperti:

- a. Penguatan sistem pengendalian internal dan pelaporan kinerja aparatur;
- b. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis layanan publik;

- c. Penerapan pelayanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- e. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Dengan memperkuat tata kelola yang akuntabel dan melayani, Kecamatan Gambut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah yang menempatkan pelayanan publik sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.

Tabel 1 2 Isu Strategis Kecamatan Gambut

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan publik yang telah berjalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik yang belum optimal 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal 3. Kapasitas ASN masih terbatas 	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- **KATA PENGANTAR;**
- **DAFTAR ISI;**
- **RINGKASAN EKSEKUTIF;**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), serta isu strategis organisasi;

- **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA**

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025**

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya

- **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TUJUAN KECAMATAN GAMBUT

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun sub kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah, yang dihitung berdasarkan pemenuhan komponen kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Formulasinya adalah Indeks Pelayanan Publik dihitung sebagai hasil penjumlahan nilai masing-masing komponen pelayanan publik yang telah dikalikan dengan bobotnya, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Tabel 2 1 Tujuan Kecamatan Gambut

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,54

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Gambut mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Gambut mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran masing-masing.

Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gambut Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> kesesuaian persyaratan; Prosedur pelayanan; Kecepatan pelayanan; Kewajaran biaya; Kompetensi petugas; Prilaku petugas pelayanan; Penanganan pengaduan; dan Kualitas sarana dan prasarana. <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan</p>	$IKM = \frac{\sum Total\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{\sum Unsur\ yang\ terisi} \times 25$	CAMAT	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan Melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p>	<p>Nilai Evaluasi Kecamatan =</p> $\left(\frac{\sum Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{\sum Total\ Unsur\ yang\ terisi} \right) \times 100\%$	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.</p> <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% <p>Kategori penilaian:</p> <p>AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>A : > 80 – 90 (Memuaskan)</p> <p>BB : > 70 – 80 (Sangat Baik)</p> <p>B : > 60 – 70 (Baik)</p> <p>CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>C : > 30 – 50 (Kurang)</p> <p>D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>	<p>Nilai SAKIP =</p> $\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ <p>Komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 30% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% 	CAMAT	LHE Perangkat Daerah

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Gambut Tahun 2025

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029. Secara garis besar Perjanjian Kinerja tahunan tahun 2025 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Unsur yang terisi}} \times 25$	95.00	Nilai			CAMAT
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	$\text{Nilai Evaluasi Kecamatan} = \left(\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	97.00	Nilai			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP = $\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$	80.00	Nilai			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	88.50	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,214,003,000	SEKRETARIS KECAMATAN
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,245,000	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$\frac{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,840,580,000	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah}}{\text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun sesuai ketentuan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,250,000	
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	$\frac{\text{Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu}}{\text{Administrasi Kepegawaian yang sesuai dan tepat waktu}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16,080,000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$\frac{\text{Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran}}{\text{Administrasi Umum yang terfasilitasi}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,641,000	
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$\frac{\text{Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan}}{\text{Realisasi BMD}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394,090,000	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$\frac{\text{Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi}}{\text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254,457,000	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$\frac{\sum \text{BMD yang terpelihara}}{\sum \text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474,660,000	
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161,026,000	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
14	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	$\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	161,026,000	
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97,632,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
16	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	$\frac{\text{Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa}}{\text{Koordinasi Kegiatan } \Sigma \text{ Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Koordinasi Kegiatan } \Sigma \text{ Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Kegiatan } \Sigma \text{ Pemberdayaan Desa yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32,886,000	
17	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	$\frac{\text{Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan}}{\text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan}}{\text{Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	64,746,000	
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Persentase Gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$ $\frac{\text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29,880,000	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum}} \times 100\%$ $\frac{\text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26,820,000	
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\text{Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$ $\frac{\text{Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\text{Ketentraman dan Ketertiban yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
21	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	$\frac{\sum \text{Pelayanan } \textit{Urusan Ketentraman dan Ketertiban} \text{ yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan } \textit{Urusan Ketentraman dan Ketertiban} \text{ yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,060,000	
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi } \textit{Urusan Pemerintahan Umum} \text{ yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi } \textit{Urusan Pemerintahan Umum} \text{ yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99,650,000	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	$\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,650,000	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
26	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	$\frac{\text{Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\text{Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
27	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	$\frac{\text{Persentase Desa yang memiliki tata Kelola Administrasi yang baik}}{\text{Desa di wilayah Kecamatan}} \times 100\%$	100.00	Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,075,000	
28	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana}}{\text{Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20,075,000	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
29	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	$\frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	913,900,920	LURAH GAMBUT
	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
31	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses	10	Layanan			
32	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	$\frac{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
33	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	$\frac{\sum \text{Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun}} \times 100\%$	100.00	Persen	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	302,008,920	SEKRETARIS KELURAHAN GAMBUT

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
34	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun}} \times 100\%$	100.00	Persen	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	83,975,000	
35	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$\text{Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran} = \frac{\sum \text{Administrasi Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Administrasi Umum yang dibutuhkan}} \times 100\%$	100.00	Persen			
36	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$\text{Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan} = \frac{\sum \text{Realisasi BMD}}{\sum \text{BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen			
37	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$\text{Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi} = \frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	100.00	Persen			
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Masyarakat			
39	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200,000,000	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
40	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68,265,000	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN GAMBUT
41	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	249,500,000	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN GAMBUT
42	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	$\frac{\text{Koordinasi Kegiatan } \Sigma \text{ Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\text{Koordinasi Kegiatan } \Sigma \text{ Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	729,563,420	LURAH GAMBUT BARAT
43	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan } \text{Urusan } \text{Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Pengaduan } \text{Urusan } \text{Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
44	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang mudah diakses	10	Layanan			

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
45	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	<p><u>Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan =</u></p> $\frac{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100\%$	100.00	Persen			
46	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	<p><u>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan =</u></p> $\frac{\sum \text{Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun}} \times 100\%$	100.00	Persen	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	367,838,420	SEKRETARIS KELURAHAN GAMBUT BARAT
47	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	<p><u>Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan =</u></p> $\frac{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen keuangan dan aset yang disusun}} \times 100\%$	100.00	Persen	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	8,980,000	
48	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	<p><u>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran =</u></p> $\frac{\sum \text{Administrasi Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Administrasi Umum yang dibutuhkan}} \times 100\%$	100.00	Persen			
49	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	<p><u>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan =</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi BMD}}{\sum \text{BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	100.00	Persen			

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$\frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	100.00	Persen			
51	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,645,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GAMBUT BARAT
52	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200,000,000	
53	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4,000,000	
54	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43,500,000	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN GAMBUT BARAT
55	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99,600,000	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN GAMBUT BARAT

Sumber : SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Nomor 031 Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup: kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100\%$$

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Gambut Kab. Banjar tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya

dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Gambut sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra), pada Tahun Anggaran 2025 menetapkan target kinerja yang terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Target tersebut disusun sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gambut. Indikator tujuan sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3 2 Realisasi Tujuan Kecamatan Gambut Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.54	Indeks	4.66	102.6

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025, tujuan *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** sebesar **4,66** yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu **4,54**. Dengan tingkat capaian mencapai **102,6%**, dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan selama tahun 2025 berjalan efektif. Capaian ini mencerminkan komitmen Kecamatan Gambut dalam memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

A.2 Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3 3 Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
KECAMATAN GAMBUT							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.00	Nilai	89.02	93.71	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	97.00	Nilai	95.42	98.37	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00	Nilai	76.82	96.03	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	88.50	Nilai	88.75	100.28	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	Persen	100	100.00	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00	Persen	89.52	89.52	Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100.00	Persen	75.00	75.00	Sedang
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitration Umum Perkantoran	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
14	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
17	Terseleenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
19	Terseleenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
28	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
KELURAHAN GAMBUT							
29	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00	Persen	100.00	95.83	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	10.00	Layanan	10.00	100.00	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
35	Terseleenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
36	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
37	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	100.00	Sangat Tinggi
39	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	1	50.00	Sangat Rendah
40	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	5	100.00	Sangat Tinggi
41	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	5	100.00	Sangat Tinggi
KELURAHAN GAMBUT BARAT							
42	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
43	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	10.00	Layanan	10.00	100.00	Sangat Tinggi
45	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
46	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
47	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
48	Terseleenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
49	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	Persen	100.00	100.00	Sangat Tinggi
51	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	100.00	Sangat Tinggi
52	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	2	100.00	Sangat Tinggi
53	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	5	100.00	Sangat Tinggi
54	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	5	100.00	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	5	100.00	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025

Penjelasan Tabel 3.3 sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Gambut kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target Kecamatan Gambut pada Tahun 2025 sebesar 95,00 dan dapat terealisasi sebesar 89,02 dengan nilai capaian 93,71 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gambut Tahun 2025 diperoleh dari hasil Nilai Rata-Rata (NRR) 9 Unsur Pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

- a. Unsur Persyaratan dengan nilai 3,27
- b. Unsur Prosedur dengan nilai 3,69
- c. Unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 3,71
- d. Unsur Biaya/Tarif dengan nilai 3,65
- e. Unsur Produk Layanan dengan nilai 3,22

- f. Unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,66
 - g. Unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,27
 - h. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,72
 - i. Unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,85
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang tercermin dalam Nilai Evaluasi Kecamatan (EKK). Dengan peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, diharapkan Kecamatan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program Pembangunan serta menyelaraskan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.

Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 97,00 dapat terealisasi 95,42 dengan nilai capaian 98,37 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 80,00 dapat terealisasi 76,82 dengan nilai capaian 96,03 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi yang termuat pada Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/79/LHE/P.Kin/I/ITDA tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Kecamatan Gambut, yaitu :

- a. Komponen Perencanaan Kinerja dengan Nilai 25,20
 - b. Komponen Pengukuran Kinerja dengan Nilai 21,95
 - c. Komponen Pelaporan Kinerja dengan Nilai 11,46
 - d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nilai 11,46
4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah adalah Penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah yang merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Indikator dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah memuat Pedoman Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah yang memuat metodologi penilaian mandiri IKKI Perangkat Daerah, termasuk pengaturan penilaiannya, yang dapat didukung dengan aplikasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah/*Control Self Assesment (CSA)*. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan melalui Surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/863/IB-II/ITDA tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan bahwa untuk unsur Kinerja Utama dikecualikan dari penilaian Mandiri IKKI Tahun 2025 sehingga unsur Penilaian Mandiri IKKI, yaitu :

1. Kepatuhan;
2. Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah memiliki indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut dengan target Tahun 2025 yaitu 88,50 dapat terealisasi 88,75 dengan nilai capaian 100,28% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut diperoleh dari akumulasi penilaian terhadap seluruh unsur penilaian yang termuat pada Surat Inspektorat Daerah kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/117/PK.IKKI/P.Kin/I/ITDA tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Tahun 2025, yaitu :

- a. Unsur Kepatuhan dengan skor 82,50%

- b. Unsur Kinerja Pelayanan Publik dengan skor 95,00%
5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dapat diukur berdasarkan tercapainya nilai akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi dan terpenuhinya berbagai indikator dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan diperoleh realisasi sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas diperoleh dari tercapainya seluruh target indikator sub kegiatan yang mendukung kinerja tersebut, yaitu :
- a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 6 dokumen meliputi : Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, RKA 2026/Perubahan 2025, DPA 2025/Perubahan 2025 dan Dokumen Perencanaan Lainnya (IKU, Perjanjian Kinerja, Tabel Keselarasan, Rencana Aksi)
- b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 laporan meliputi LKJiP Tahun 2024, Laporan Kinerja Triwulan I, Laporan Kinerja Triwulan II dan Laporan Kinerja Triwulan III.
- c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 12 laporan yang meliputi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang diinput melalui Aplikasi SIMONDALEV setiap bulan.
6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 89,52% dan nilai capaian 89,52% dengan predikat **Tinggi**.

Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas diperoleh dari tercapainya seluruh target indikator sub kegiatan yang mendukung kinerja tersebut, yaitu :

- a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 24 orang dari target 35 orang meliputi : 23 orang PNS dan 1 orang PPPK.
 - b. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 laporan meliputi Laporan GU, Laporan LS dan Dokumen SPJ.
 - c. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah merupakan perbaikan atau peningkatan dalam penyajian, akurasi, kelengkapan, dan relevansi laporan yang disusun oleh perangkat daerah (SKPD) terkait pengelolaan dan pengamanan aset daerah serta aset tersebut diamankan dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Adapun indikator kinerja sasaran ini yaitu persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah diperoleh realisasi sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah diperoleh dari tercapainya seluruh target indikator sub kegiatan yang mendukung kinerja tersebut, yaitu :

- a. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 12 laporan meliputi Buku Persediaan, Kartu Inventaris Barang (KIB), Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang, Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), Laporan Persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang smesteran/tahunan dan Dokumen pendukung terkait lainnya.
8. Sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan terlaksananya seluruh proses administrasi kepegawaian (pengelolaan data, dokumen, dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN) secara efisien, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini didukung oleh optimalnya penggunaan sistem informasi kepegawaian serta peningkatan kualitas layanan administrasi yang dirasakan oleh pegawai pada Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja sasaran ini yaitu Persentase

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu sebesar 75% dan nilai capaian 75% dengan predikat **Sedang**.

Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diperoleh dari tercapainya seluruh target indikator sub kegiatan yang mendukung kinerja tersebut, yaitu :

- a. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 9 dokumen meliputi Dokumen SKP Triwulan IV Tahun 2024, Dokumen SKP Final Tahun 2024, Dokumen SKP Triwulan I, Dokumen SKP Triwulan II, Dokumen SKP Triwulan III, Dokumen Penilaian Pegawai Triwulan II, Dokumen Penilaian Pegawai Triwulan III dan Dokumen Penilaian Pegawai Triwulan IV.
 - b. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 1 orang dari target 2 orang yaitu An. Ermilia Susana, S.Si mengikuti Diklat Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan IV di Jakarta.
9. Sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor yaitu terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran diukur dari tersedianya dan berfungsinya secara optimal semua sarana dan prasarana perlatan, dan kebutuhan operasional kantor dengan tujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan administrasi rutin dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja sasaran ini yaitu persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Terselenggaranya kegiatan kantor diperoleh dari tercapainya seluruh target indikator sub kegiatan yang mendukung kinerja tersebut, yaitu :

- a. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan telah terealisasi 1 paket dari target 1 paket.
- b. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan telah terealisasi 4 paket dari target 4 paket

- c. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan telah terealisasi 4 paket dari target 4 paket
 - d. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan telah terealisasi 1 paket dari target 1 paket
 - e. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu telah terealisasi 12 laporan dari target 12 laporan
 - f. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD telah terealisasi 12 laporan dari target 12 laporan
 - g. Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD telah terealisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen
10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk memastikan pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai rencana kebutuhan dan mendukung kinerja perangkat daerah. Adapun indikator sasaran ini yaitu Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan target Tahun 2025 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
- a. Tersedianya Mebel telah terealisasi 1 unit dari target 1 unit yaitu pengadaan Sofa tamu
 - b. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya telah terealisasi 17 unit dari target 17 unit yaitu pengadaan
 - i. Kursi Non Hidrolik sebanyak 1 unit
 - j. Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 unit
 - k. Filling kabinet besi sebanyak 2 unit
 - l. AC Split sebanyak 2 unit
 - m. Meja Kerja Esselon III sebanyak 1 unit
 - n. Kursi Pejabat Esselon III sebanyak 1 unit
 - o. Kursi Pejabat Eselon IV sebanyak 5 unit
 - p. PC All In One sebanyak 3 unit
 - q. Printer sebanyak 1 unit
11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan menjamin terpenuhinya jasa penunjang yang diperlukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun indikator sasaran kinerja

ini yaitu Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target Tahun 2025 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah terealisasi 12 laporan surat masuk dan surat keluar dari target 12 laporan.
- b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah terealisasi 2 laporan yaitu Laporan Hemat Energi yang dilaporkan setiap semester dari target 2 laporan.
- c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terealisasi 12 laporan yaitu Laporan pelaksanaan pembayaran upah tenaga PTT setiap bulan dari target 12 laporan

12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan difokuskan pada pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi optimal dan mendukung pelayanan serta operasional pemerintahan. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Tahun 2025 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah terealisasi 7 unit dari target 7 unit
- b. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terealisasi 20 unit dari target 20 unit
- c. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah terealisasi 3 unit dari target 3 unit.

13. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan bertujuan meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, yaitu:

- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten
- Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS)
- Pelaksanaan PHBI (Safari Ramadhan/Isra Mi'raj/Maulid Nabi)
- Pelaksanaan Pra Rembuk Stunting /Rembuk Stunting
- Pelaksanaan PPKS
- Pelaksanaan Poskesos

14. Sasaran Kinerja terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat diarahkan untuk memastikan seluruh urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan realisasi sebanyak 6 laporan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Pelaksanaan PHBI (Isra Mi'raj/Maulid Nabi/Safari Ramadhan) sebanyak 1 laporan
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Pra Rembuk Stunting/ Rembuk Stunting sebanyak 1 laporan
- c. Laporan Hasil Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) sebanyak 1 laporan
- d. Laporan Hasil Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten sebanyak 1 laporan
- e. Laporan Hasil Pelaksanaan PPKS sebanyak 1 laporan
- f. Laporan Hasil Pelaksanaan Poskesos/TKPK sebanyak 1 laporan

15. Sasaran Kinerja Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- b. Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

16. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa difokuskan pada penguatan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa telah merealisasikan target sebanyak 3 lembaga kemasyarakatan yaitu BPD, LPM dan RT/RW;
- b. Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah merealisasikan sebanyak 3 laporan dengan rincian sebagai berikut :
 - Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Bumdes sebanyak 1 laporan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan Monev Desa sebanyak 1 laporan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan Pokjnal Posyandu sebanyak 1 laporan

17. Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertujuan meningkatkan peran dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan pemberdayaan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pembinaan PKK Desa/Kelurahan
- b. Terlaksananya Rapat Koordinasi PKK Desa/Kelurahan
- c. Terlaksananya Jambore PKK

18. Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diarahkan untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib melalui penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

19. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan memperkuat koordinasi antar pihak terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun indikator sasaran kinerja ini yaitu Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan telah terealisasi sebanyak 12 laporan pelaksanaan Forkopimcam; dan
- b. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat telah terealisasi sebanyak 1 laporan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

20. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan **Urusan Ketentraman dan Ketertiban** yang ditindaklanjuti difokuskan pada peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban. Adapun memiliki indikatornya yaitu Persentase Pengaduan **Urusan Ketentraman dan Ketertiban** yang ditindaklanjuti dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum melalui berbagai kanal, baik secara langsung, surat, maupun media komunikasi lainnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat penegak ketertiban, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur terkait lainnya dalam rangka penanganan pengaduan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil tindak lanjut pengaduan.

21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban** bertujuan memastikan pelayanan urusan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan sesuai standar pelayanan. Adapun indikator Persentase Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Melakukan penyusunan, peninjauan, dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ketenteraman dan ketertiban; dan
- b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas sistem dan prosedur pelayanan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

22. Sasaran Kinerja terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diarahkan untuk mendukung penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara efektif. Adapun indikatornya yaitu Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung kinerja, yaitu :

- a. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan realisasi 1 laporan pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada.

23. Sasaran Kinerja Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertujuan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Adapun indikatornya yaitu persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh beberapa kinerja, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan perangkat daerah terkait;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum yang terjadi di wilayah kecamatan; dan

- c. Menyusun laporan hasil koordinasi dan fasilitasi sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja.

24. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah difokuskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Adapun indikatornya yaitu Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja, yaitu :

- a. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan realisasi 1 laporan pelaksanaan Peringatan HUT RI.

25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan **Usuran Pemerintahan Umum** yang ditindaklanjuti bertujuan meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang pemerintahan umum. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pengaduan **Usuran Pemerintahan Umum** yang ditindaklanjuti dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum melalui berbagai kanal, baik secara langsung, surat, maupun media komunikasi lainnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat penegak ketertiban, pemerintah desa/kelurahan, serta unsur terkait lainnya dalam rangka penanganan pengaduan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil tindak lanjut pengaduan.

26. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan **Usuran Pemerintahan Umum** diarahkan untuk menjamin pelayanan pemerintahan umum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pelayanan **Usuran Pemerintahan Umum** yang sesuai dengan Standar Pelayanan dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Melakukan penyusunan, peninjauan, dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pemerintahan Umum; dan
- b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas sistem dan prosedur pelayanan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

27. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola administrasi desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Adapun indikatornya yaitu Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa terkait tata naskah dinas, administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, serta administrasi keuangan desa sesuai ketentuan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa; dan
- c. Menyusun laporan hasil pembinaan dan evaluasi sebagai bahan pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja kecamatan.

28. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa difokuskan pada fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun indikatornya yaitu Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 1 laporan
- b. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 1 laporan
- c. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 laporan
- d. Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebanyak 1 laporan

- e. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 laporan.

29. Sasaran Kinerja Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan Gambut diarahkan pada peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan, penanganan pengaduan, kemudahan akses pelayanan, serta penerapan standar pelayanan urusan pemberdayaan kelurahan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti sebanyak 100%
- b. Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses sebanyak 10 layanan
- c. Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan sebanyak 100%
- d. Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan terealisasi sebesar 100%
- e. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran terealisasi sebesar 100%
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan terealisasi sebesar 100%
- g. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi terealisasi sebesar 100%
- h. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terealisasi sebesar 100%
- i. Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun terealisasi sebesar 100%
- j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terealisasi sebesar 100%

30. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** yang ditindaklanjuti bertujuan meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat di kelurahan Gambut. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang ditindaklanjuti dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** melalui berbagai kanal, baik secara langsung, surat, maupun media komunikasi lainnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penanganan pengaduan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil tindak lanjut pengaduan

31. Sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan pemberdayaan kelurahan secara mudah, cepat, dan merata. Kemudahan akses pelayanan diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelayanan yang sederhana, informasi yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun indikatornya yaitu Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang Mudah diakses dapat terealisasi sebanyak 10 layanan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut ini didukung oleh data layanan yaitu :

- a. Surat Keterangan Kematian;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c. Surat keterangan ahli waris;
- d. Surat keterangan belum bekerja;
- e. Surat keterangan belum menikah;
- f. Surat keterangan menikah;
- g. Surat keterangan belum memiliki rumah;
- h. Surat keterangan usaha;
- i. Surat keterangan keadaan tanah;
- j. Surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah (sporadik)

32. Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut** diarahkan untuk menjamin pelayanan pemerintahan umum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan**

Gambut yang sesuai dengan Standar Pelayanan dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut ini didukung oleh aktivitas :

- a. Melakukan penyusunan, peninjauan, dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pemerintahan Umum; dan
- b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas sistem dan prosedur pelayanan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

33. Sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan diperoleh realisasi sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Menyusun RKA Pergeseran/Perubahan Kelurahan Gambut Tahun 2025 dan RKA Kelurahan Gambut Tahun 2026; dan
- b. Menyusun laporan evaluasi kinerja Kelurahan Gambut Tahun 2025.

34. Sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 laporan meliputi Laporan LS dan Dokumen SPJ.

35. Sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator kinerja Persentase Terasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Terasilitasnya penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran diukur dari tersedianya dan berfungsinya secara optimal semua sarana dan prasarana peralatan, dan kebutuhan operasional kantor dengan tujuan untuk

memastikan seluruh pekerjaan administrasi rutin dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Terealisasinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- b. Terealisasinya peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. Terealisasinya peralatan rumah tangga;
- d. Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan;
- e. Terealisasinya fasilitasi kunjungan tamu;
- f. Terealisasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

36. Sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut ini yaitu terealisasinya pengadaan barang milik daerah sebagai berikut :

- a. AC Split 2 unit
- b. Laptop 2 unit
- c. PC 2 unit
- d. Sepeda Motor 1 unit

37. Sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut ini yaitu :

- a. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

38. Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gambut bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Partisipasi masyarakat

merupakan unsur penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 4 lembaga kemasyarakatan dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut ini yaitu :

a. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

39. Sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Gambut bertujuan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun diperoleh realisasi indikator sebanyak 1 unit dan nilai capaian 50% dengan predikat **Sangat Rendah**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut ini yaitu :

a. Pengecoran Jalan di Gang Rahmatillah RT.10, Kelurahan Gambut

40. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 5 Pokmas/Ormas dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Gambut ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Posyandu Balita;
- b. Pelaksanaan Posyandu Lansia;
- c. Pelaksanaan Rembuk Stunting;

41. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 5 Pokmas/Ormas dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Gambut ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Koordinasi RT;
- b. Pelaksanaan Koordinasi RW; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi Linmas

42. Sasaran Kinerja Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan Gambut Barat diarahkan pada peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan, penanganan pengaduan, kemudahan akses pelayanan, serta penerapan standar pelayanan urusan pemberdayaan kelurahan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut Barat ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti sebanyak 100%
- b. Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses sebanyak 10 layanan
- c. Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan sebanyak 100%
- d. Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan terealisasi sebesar 100%
- e. Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran terealisasi sebesar 100%
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan terealisasi sebesar 100%
- g. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi terealisasi sebesar 100%
- h. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terealisasi sebesar 100%
- i. Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun terealisasi sebesar 100%
- j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terealisasi sebesar 100%

43. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** yang ditindaklanjuti bertujuan meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat di kelurahan Gambut. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang ditindaklanjuti dapat diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut Barat ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** melalui berbagai kanal, baik secara langsung, surat, maupun media komunikasi lainnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penanganan pengaduan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil tindak lanjut pengaduan

44. Sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan pemberdayaan kelurahan secara mudah, cepat, dan merata. Kemudahan akses pelayanan diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelayanan yang sederhana, informasi yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun indikatornya yaitu Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut yang Mudah diakses dapat terealisasi sebanyak 10 layanan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut Barat ini didukung oleh data layanan yaitu :

- a. Surat Keterangan Kematian;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c. Surat keterangan ahli waris;
- d. Surat keterangan belum bekerja;
- e. Surat keterangan belum menikah;
- f. Surat keterangan menikah;
- g. Surat keterangan belum memiliki rumah;
- h. Surat keterangan usaha;
- i. Surat keterangan keadaan tanah;

j. Surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah (sporadik)

45. Sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** diarahkan untuk menjamin pelayanan pemerintahan umum sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Adapun indikatornya yaitu Persentase Pelayanan **Urusan Pemberdayaan Kelurahan Gambut Barat** yang sesuai dengan Standar Pelayanan dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Lurah Gambut Barat ini didukung oleh aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan, peninjauan, dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pemerintahan Umum; dan
- b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas sistem dan prosedur pelayanan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

46. Sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan diperoleh realisasi sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut Barat ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Menyusun RKA Pergeseran/Perubahan Kelurahan Gambut Barat Tahun 2025 dan RKA Kelurahan Gambut Barat Tahun 2026; dan
- b. Menyusun laporan evaluasi kinerja Kelurahan Gambut Tahun 2025.

47. Sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut Barat ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 laporan meliputi Laporan LS dan Dokumen SPJ.

48. Sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator kinerja Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum

Perkantoran diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran diukur dari tersedianya dan berfungsinya secara optimal semua sarana dan prasarana perlatan, dan kebutuhan operasional kantor dengan tujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan administrasi rutin dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut Barat ini didukung oleh aktivitas yaitu :

- a. Terealisasinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- b. Terealisasinya peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. Terealisasinya peralatan rumah tangga;
- d. Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan;
- e. Terealisasinya fasilitasi kunjungan tamu;
- f. Terealisasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

49. Sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut Barat ini yaitu terealisasinya pengadaan barang milik daerah sebagai berikut :

- a. Laptop 1 unit
- b. PC 1 unit
- c. Sepeda Motor 1 unit

50. Sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi diperoleh realisasi indikator sebesar 100% dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Sekretariat Kelurahan Gambut Barat ini yaitu :

- a. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

51. Sasaran kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gambut bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 4 lembaga kemasyarakatan dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut Barat ini yaitu :

a. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

52. Sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Gambut bertujuan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun diperoleh realisasi indikator sebanyak 1 unit dan nilai capaian 50% dengan predikat **Sangat Rendah**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut Barat ini yaitu :

a. Pengecoran Jalan di Gang Rumbia, Kelurahan Gambut Barat

b. Pengecoran Jalan di Gang Bangkok, Kelurahan Gambut Barat

53. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 5 Pokmas/Ormas dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Gambut Barat ini yaitu :

a. Pelaksanaan Posyandu Balita;

b. Pelaksanaan Posyandu Lansia;

c. Pelaksanaan Rembuk Stunting;

54. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 5 Pokmas/Ormas dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Gambut Barat ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Koordinasi RT;
- b. Pelaksanaan Koordinasi RW; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi Linmas

55. Sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diarahkan pada peningkatan peran kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diperoleh realisasi indikator sebanyak 5 Pokmas/Ormas dan nilai capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Adapun yang mendukung sasaran kinerja yang diampu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gambut Barat ini yaitu :

- a. Pelaksanaan Pembinaan dan Rakor PKK

A.3 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Gambut sebagaimana yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI I	CAPAIAN (%)	REALISASI I	CAPAIAN (%)	REALISASI I	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.02	93.71	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi IKU
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	95.42	98.37	96.67	122.37	77.36	105.97	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.82	96.03	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi IKU
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Nilai	87.75	100.28	88.07	115.88	73.24	100.57	
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan berkualitas	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat	Persen	89.52	89.52	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	75	75.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
14	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
16	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
17	Terseleenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
19	Terseleenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
21	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
26	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
27	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
28	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
KELURAHAN GAMBUT										
29	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	95.83	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
31	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	10	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
32	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
33	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
34	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
35	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
36	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
37	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	4	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	50	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
40	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
41	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
KELURAHAN GAMBUT BARAT										
42	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
43	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
44	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	10	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
45	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
46	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
47	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		TAHUN 2024		TAHUN 2023		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
49	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100.00	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
51	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	4	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
52	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
53	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
54	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran
55	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	100	NA	NA	NA	NA	Tahun 2023 dan 2024 belum menjadi Indikator sasaran

Sumber : Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029

Berdasarkan data pada tabel 3.4 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa secara umum, realisasi capaian kinerja Kecamatan Gambut dan kelurahan pada Tahun 2025 menunjukkan **kinerja yang sangat baik dan relatif stabil** dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada sasaran strategis yang memiliki data pembanding, kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kepatuhan kinerja intern tetap berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun terdapat fluktuasi capaian yang masih dalam batas wajar.

Sebagian besar sasaran strategis pada Tahun 2025, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, **telah tercapai sesuai target dengan capaian hingga 100%**, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program. Beberapa sasaran yang belum mencapai target optimal menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan **konsistensi dan komitmen berkelanjutan** dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Periode Akhir Renstra 2025-2029

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Gambut selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3 5 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)	PERSENTASE CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN GAMBUT						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.02	99.50	111.77
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	95.42	99.50	104.28
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.82	82.50	107.39
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Nilai	88.75	91.00	102.54
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100.00	100.00	100.00
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	89.52	100.00	111.71
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	75.00	100.00	133.33
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasiliasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	Persen	100.00	100.00	100.00
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)	PERSENTASE CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)
1	2	3	4	5	6	7
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100.00	100.00	100.00
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100.00	100.00	100.00
14	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100.00	100.00	100.00
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100.00	100.00	100.00
16	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00
17	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100.00	100.00	100.00
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	100.00	100.00
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)	PERSENTASE CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)
1	2	3	4	5	6	7
21	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100.00	100.00	100.00
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100.00	100.00	100.00
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persen	100.00	100.00	100.00
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	100.00	100.00
26	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100.00	100.00	100.00
27	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	Persen	100.00	100.00	100.00
28	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	100.00	100.00
KELURAHAN GAMBUT						
29	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100.00	100
30	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)	PERSENTASE CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)
1	2	3	4	5	6	7
	Kelurahan yang ditindaklanjuti					
31	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	10	5.00	50
32	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100	100.00	100
33	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100.00	100
34	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100.00	100
35	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100.00	100
36	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100.00	100
37	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100.00	100
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	100
39	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	2	200

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)	PERSENTASE CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)
1	2	3	4	5	6	7
40	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	5	100
41	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	5	100
KELURAHAN GAMBUT BARAT						
42	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100.00	100
43	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100.00	100
44	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	10	5.00	50
45	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100	100.00	100
46	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100.00	100
47	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100.00	100
48	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100.00	100

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)	PERSENTASE CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2030)
1	2	3	4	5	6	7
49	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100.00	100
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100.00	100
51	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	100
52	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	100
53	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	5	100
54	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	5	100
55	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	5	100

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Periode Akhir Renstra menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Kecamatan Gambut, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 89,02 belum melampaui target di akhir periode Renstra yaitu 99,50 dengan capaian 111,77%.
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan terealisasi sebesar 95,42 belum melampaui target di akhir periode Renstra yaitu 99,50 dengan capaian 104,28%.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 76,82 belum melampaui target di akhir periode Renstra yaitu 82,50 dengan capaian 107,39%.
4. Hampir seluruh indikator kinerja strategis telah tercapai 100 persen, bahkan sebagian besar melampaui target Renstra, khususnya pada aspek kualitas pelayanan, kinerja pemerintahan, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, aset, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang kelurahan serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga telah memenuhi target. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian, yaitu kemudahan akses pelayanan urusan pemberdayaan kelurahan yang baru mencapai 50 persen dari target akhir Renstra, sehingga diperlukan penguatan inovasi dan perluasan jenis layanan ke depan. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mencerminkan bahwa pelaksanaan Renstra berada pada jalur yang tepat dan menjadi modal kuat untuk mencapai target akhir periode tahun 2030.

A.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum

diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

Tabel 3 6 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN GAMBUT						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.02	NA	NA
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	95.42	NA	NA
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.82	NA	NA
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Nilai	88.75	NA	NA
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100.00	NA	NA
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	89.52	NA	NA
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100.00	NA	NA
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	75.00	NA	NA
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasiliasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	Persen	100.00	NA	NA
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100.00	NA	NA

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100.00	NA	NA
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100.00	NA	NA
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100.00	NA	NA
14	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100.00	NA	NA
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100.00	NA	NA
16	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100.00	NA	NA
17	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100.00	NA	NA
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	NA	NA
19	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100.00	NA	NA
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	NA	NA
21	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100.00	NA	NA

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100.00	NA	NA
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100.00	NA	NA
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persen	100.00	NA	NA
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persen	100.00	NA	NA
26	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100.00	NA	NA
27	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	Persen	100.00	NA	NA
28	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100.00	NA	NA
KELURAHAN GAMBUT						
29	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	NA	NA
30	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	NA	NA
31	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	10	NA	NA

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
32	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100	NA	NA
33	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	NA	NA
34	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	NA	NA
35	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasiliasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	Persen	100	NA	NA
36	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	NA	NA
37	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	NA	NA
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	NA	NA
39	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	NA	NA
40	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	NA	NA
41	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	NA	NA

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
KELURAHAN GAMBUT BARAT						
42	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	NA	NA
43	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	NA	NA
44	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	Layanan	10	NA	NA
45	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persen	100	NA	NA
46	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	NA	NA
47	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	NA	NA
48	Terseleenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	NA	NA
49	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	NA	NA
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	NA	NA
51	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	NA	NA

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
52	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	NA	NA
53	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	NA	NA
54	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	NA	NA
55	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	NA	NA

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, indikator pada tingkat Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, dan Kelurahan Gambut Barat menunjukkan realisasi yang sangat baik, dimana sebagian besar indikator berbasis persentase mencapai **100%**, serta indikator berbasis nilai dan jumlah menunjukkan capaian yang optimal.

Namun demikian, dalam tabel perbandingan tidak tersedia data realisasi atau target pada tingkat provinsi maupun nasional (ditandai dengan NA). Oleh karena itu, analisis perbandingan secara kuantitatif terhadap capaian provinsi dan nasional belum dapat dilakukan secara langsung.

A.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Sasaran Strategis Kecamatan Gambut yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Dalam Upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memperoleh nilai pada Tahun 2025 yaitu 89,02 dengan nilai capaian sebesar 93,71% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan seperti rehab ruang pelayanan
- Petugas pelayanan yang kompeten, ramah dan komunikatif dalam memberikan pelayanan.

Faktor Penghambat Sasaran

Faktor penghambat tercapainya sasaran adalah sebagai berikut :

- Kurangnya informasi kepada Masyarakat terkait produk layanan apa saja yang masih dikeluarkan oleh Kecamatan Gambut
- Kurangnya informasi kepada Masyarakat terkait persyaratan yang dipenuhi pada produk layanan yang dikeluarkan Kecamatan Gambut.
- Petugas layanan sudah memberikan pelayanan dengan baik, namun tidak siap di tempat layanan sehingga menyebabkan penerima layanan menunggu layanan.

Upaya Perbaikan

- Membagikan informasi terkait produk layanan yang dikeluarkan Kecamatan Gambut pada website, Instagram dan membuat X-Banner.
- Menambah kompetensi petugas layanan terkait pemberian layanan yang baik dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas layanan.

2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan perolehan nilai 95,42 dan capaian sebesar 98,37% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Koordinasi yang baik pada unit Kecamatan Gambut
- Kelengkapan administrasi yang baik di masing-masing unit.

Faktor Penghambat Sasaran

- Terlambatnya memenuhi data dukung Monev Desa, karena pelaksanaan kegiatan di bulan November

Upaya Perbaikan

- Penyusunan jadwal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Desa pada tahun berikutnya dilaksanakan sebelum bulan November.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan perolehan nilai 76,82 dan capaian sebesar 96,03% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Mitra Kecamatan yang terus mendampingi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
- Komitmen Pimpinan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat Sasaran

- Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai serta belum sepenuhnya diinternalisasi kepada pegawai untuk dipahami dan menjadi kepedulian serta komitmen;
- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara optimal dan berjenjang;
- Pelaporan kinerja belum disusun secara berkala berdasarkan hasil pemantauan evaluasi dan kinerja; dan
- Evaluasi internal belum sepenuhnya dilakukan oleh sumber daya manusia yang memadai dan dilakukan secara optimal, berjenjang dan berkelanjutan.

Upaya Perbaikan

- Melakukan rapat koordinasi Tim Penyusunan SAKIP Kecamatan;
- Melakukan tindak lanjut pada setiap rekomendasi yang ada pada LHE SAKIP Kecamatan Gambut Tahun 2025;

4. Meningkatnya Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepatuhan

dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut dengan perolehan Nilai 88,75 dan capaian sebesar 100,28% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Koordinasi yang baik di Sekretariat Kecamatan Gambut;
- Data yang telah terdokumentasi dengan baik;
- Pengampu sasaran yang berkomitmen dalam pencapaian sasaran kinerja

Faktor Penghambat Sasaran

- Belum menjabarkan Proses Bisnis Utama ke dalam SOP;
- Belum memutakhirkan peta proses bisnis sesuai dengan Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- Belum melakukan penyusunan register risiko dan RTP yang relevan.

Upaya Perbaikan

- Melakukan rapat koordinasi atas hasil IKKI Kecamatan Gambut Tahun 2025
- Melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur yang belum dapat dipenuhi.

5. Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Bappedalitbang Kab.Banjar yang terus mendampingi Kecamatan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Koordinasi yang baik di Bag Perencanaan; dan
- Komitmen Pimpinan dalam memperoleh dokumen perencanaan yang berkualitas.

Faktor Penghambat Sasaran

- Masih terdapatnya beberapa revisi beberapa pada dokumen perencanaan; dan
- Belum maksimalnya pengawasan terhadap realisasi kinerja dan penyerapan anggaran .

Upaya Perbaikan

- Akan dilakukan perbaikan target pada revid Renstra

6. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya SITAPAI GAMBUT memudahkan bendahara, PPTK dan PPK dalam menjalankan sistem keuangan jika SIPD mengalami gangguan;
- Adanya pengawasan terhadap penatausahaan keuangan di Kelurahan; dan
- Koordinasi yang baik pada Bag. Keuangan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Pemenuhan kelengkapan SPJ yang terlambat dari masing-masing unit sehingga terkendala pendokumentasian tepat waktu; dan
- Masih adanya kesalahan penginputan dikarenakan kesalahan penulisan kode belanja.

Upaya Perbaikan

- Melakukan koordinasi dengan masing-masing unit terkait kelengkapan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu.

7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan

Pengamanan Aset Barang Milik Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya rekonsiliasi aset yang rutin; dan
- Koordinasi yang baik dengan BPKPAD bidang aset.

Faktor Penghambat Sasaran

- Kecamatan Gambut memiliki gudang penyimpanan aset

Upaya Perbaikan

- Lakukan Monitoring dan Evaluasi terkait kualitas pengelolaan aset

8. Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Dukungan pimpinan dalam mengawasi, membina, dan mengevaluasi kinerja pegawai mendorong terlaksananya penilaian kinerja secara konsisten dan tepat waktu; dan
- Koordinasi dan komunikasi internal yang baik.

Faktor Penghambat Sasaran

- Komitmen dan kedisiplinan pegawai yang beragam;
- Perubahan indikator kinerja, menyebabkan belum optimalnya pemahaman pegawai pada masing-masing indikator kinerja; dan
- Pemahaman pegawai terhadap sistem penilaian kinerja yang belum merata.

Upaya Perbaikan

- Melakukan rapat internal terkait indikator kinerja masing-masing pegawai; dan
- Pimpinan memberikan himbauan di setiap rapat terkait pencapaian indikator kinerja.

9. Terselenggaranya kegiatan kantor

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Dukungan pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran
- Koordinasi dan komunikasi internal yang baik

Faktor Penghambat Sasaran

- Adanya kebutuhan yang tidak tersedia pada DPA
- Kurangnya minat pengunjung/tamu dalam mengisi buku tamu
- Tidak adanya ruang arsip di Kecamatan

Upaya Perbaikan

- Membuat tabel rencana kebutuhan penunjang administrasi umum kantor;
- Petugas layanan agar lebih aktif dalam mengarahkan tamu/pengunjung untuk mengisi buku tamu; dan
- Menyusun rencana rehab atau pembuatan ruang khusus arsip Kecamatan

10. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Pengadaan sesuai rencana kebutuhan;
- Koordinasi yang baik dengan Pejabat Pengadaan; dan
- Proses pengadaan barang yang mudah melalui e-catalog sehingga menghemat waktu dan biaya instansi

Faktor Penghambat Sasaran

- Proses pemilihan penyedia dikarenakan beragamnya harga yang disediakan di e-catalog;

Upaya Perbaikan

- Lakukan survei penyedia lebih awal di e-catalog

11. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Tersedianya Aplikasi Srikandi untuk aplikasi surat menyurat;
- Tenaga kerja yang kompeten dalam mendukung kinerja Kecamatan; dan
- Sistem pembayaran listrik dan air yang mudah, seperti langsung transfer melalui rekening Kecamatan

Faktor Penghambat Sasaran

- Adanya gangguan pada Aplikasi Srikandi;
- Adanya kebocoran air yang terlambat diatasi oleh PDAM sehingga terdapat biaya yang lebih dari bulan sebelumnya

Upaya Perbaikan

- Tetap lakukan pencatatan dan pengarsipan manual terhadap surat masuk dan surat keluar; dan
- Koordinasi dengan pihak PTAM Intan Banjar terkait kebocoran dan biaya lebih yang menjadi tanggungan SKPD.

12. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Koordinasi antara pengelola BMD dan unit kerja terkait;
- SDM yang kompeten dalam pengelolaan BMD

Faktor Penghambat Sasaran

- Kondisi sebagian BMD yang sudah tua atau rusak berat;
- Banyaknya jumlah dan jenis BMD yang harus dipelihara; dan

- Kerusakan pada peralatan dan mesin yang tidak bisa diprediksi

Upaya Perbaikan

- Menyusun jadwal pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;
- Koordinasi dengan bidang aset terkait penghapusan barang

13. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Peran Pimpinan yang memberikan solusi dalam kendala yang dihadapi;
- Antusiasme peserta KKS dari instansi vertikal dalam mengikuti KKS;
- Panitia yang turut serta berperan dalam setiap kegiatan

Faktor Penghambat Sasaran

- Sempat tertundanya beberapa kegiatan dikarenakan Instruksi Kemendagri dan padatnya kegiatan di Kecamatan; dan
- Kondisi cuaca yang sering hujan serta halaman Kecamatan dalam keadaan kurang baik

Upaya Perbaikan

- Aktif berkoordinasi dengan Mitra Kecamatan;
- Melakukan penjadwalan ulang terhadap beberapa kegiatan yang tertunda
- Lakukan koordinasi dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Gambut agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan.

14. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Peran Pimpinan yang memberikan solusi dalam kendala yang dihadapi;
- Koordinasi yang baik antar unit di Kecamatan;
- Ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Pelaksanaan MTQ yang sempat tertunda berdasarkan arahan Kemendagri karena kondisi yang sedang tidak kondusif;
- Adanya beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dikarenakan padatnya jadwal di Kecamatan Gambut; dan
- Kondisi cuaca yang sering hujan serta halaman Kecamatan dalam keadaan kurang baik

Upaya Perbaikan

- Melakukan koordinasi aktif dengan Kabupaten terkait jadwal ulang MTQ Kabupaten;
- Melakukan penjadwalan ulang untuk kegiatan yang tertunda; dan
- Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk pemindahan tempat pelaksanaan kegiatan KKS atau menggunakan Aula Kecamatan.

15. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komunikasi yang efektif antara camat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Tersedianya data dan informasi yang lengkap terkait kebutuhan dan potensi wilayah;
- Hubungan yang baik antara pengurus PKK, kader, dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga memudahkan pelaksanaan rakor

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesalahan penginputan usulan desa/Kelurahan;

- Kondisi Halaman Kantor Kecamatan yang banjir, sehingga membuat peserta Musrenbang yang hadir kebasahan; dan
- Padatnya jadwal kegiatan di Kecamatan sehingga adanya jadwal pelaksanaan Rakor dan Pembinaan PKK mundur dari perencanaan.

Upaya Perbaikan

- Melakukan verifikasi yang teliti terhadap usulan desa/kelurahan;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dengan menyampaikan kondisi terkini; dan
- Melakukan penjadwalan ulang untuk kegiatan yang tertunda.

16. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komunikasi yang efektif antara camat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Tersedianya data dan informasi yang lengkap terkait kebutuhan dan potensi wilayah

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesalahan penginputan usulan Desa/Kelurahan;
- Kondisi Halaman Kantor Kecamatan yang banjir, sehingga membuat peserta Musrenbang yang hadir kebasahan.

Upaya Perbaikan

- Melakukan verifikasi yang teliti terhadap usulan desa/kelurahan;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dengan menyampaikan kondisi terkini.

17. Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Kader PKK yang aktif, solid, dan memiliki semangat tinggi;
- Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor seperti puskesmas dan Lembaga kemasyarakatan;
- Tersedianya data dan dokumentasi kegiatan yang lengkap.

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan para kader sehingga kegiatan tidak lengkap dihadiri para kader;
- Pelaporan dan dokumentasi masih manual sehingga memperlambat proses administrasi.

Upaya Perbaikan

- Melibatkan generasi muda dan melakukan kaderisasi secara terencana;
- Mengadakan rapat evaluasi berkala untuk membahas capaian dan kendala.

18. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;
- Adanya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib.

Faktor Penghambat Sasaran

- Terkadang terjadi lambatnya respons antar instansi;
- Mekanisme pengaduan masyarakat belum terintegrasi sehingga respons terhadap laporan menjadi lambat

Upaya Perbaikan

- Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengutamakan dialog dan mediasi sebelum tindakan penegakan hukum

19. Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya arahan dari pimpinan daerah dalam mendukung koordinasi lintas sektor;
- Terselenggaranya rapat koordinasi secara berkala yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait;
- Kerja sama yang solid antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan patroli atau operasi gabungan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum terintegrasi antar instansi;
- Keputusan rapat tidak seluruhnya diimplementasikan di lapangan

Upaya Perbaikan

- Membangun hubungan kerja yang harmonis antar pimpinan dan personel instansi.

20. Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang

ditindaklanjuti dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Kerja sama yang baik dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan perangkat kecamatan/kelurahan dalam menangani laporan Masyarakat.

Faktor Penghambat Sasaran

- Laporan masyarakat kurang jelas (lokasi, waktu, bukti pendukung) sehingga menyulitkan verifikasi

Upaya Perbaikan

Membangun hubungan kerja yang harmonis antar pimpinan dan personel instansi

21. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan
- Adanya SOP pelayanan pengaduan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan SDM dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban
- Monitoring terhadap kepatuhan terhadap SOP belum berjalan maksimal

Upaya Perbaikan

- Meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan

22. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Koordinasi yang baik dengan Satpol PP untuk pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada
- Meningkatnya pemahaman Linmas / perangkat desa terhadap substansi Perda dan Perkada

Faktor Penghambat Sasaran

- Data pelanggaran dan tindak lanjut belum terhubung antar perangkat daerah

Upaya Perbaikan

- Meningkatkan koordinasi terkait pelanggaran dan tindak lanjut atas pelanggaran di wilayah desa/kelurahan

23. Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat desa dalam proses koordinasi

Faktor Penghambat Sasaran

- Belum seluruh aparatur memiliki kemampuan komunikasi dan mediasi yang memadai

Upaya Perbaikan

- Melaksanakan pelatihan komunikasi efektif, mediasi konflik, dan manajemen koordinasi

24. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator

Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinkronisasi antar bidang/seksi dalam perangkat daerah berjalan baik dan responsif

Faktor Penghambat Sasaran

- Beban kerja yang tinggi tidak selalu sebanding dengan jumlah dan kapasitas aparatur
- Informasi awal yang belum lengkap menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Upaya Perbaikan

- Membuat perencanaan rinci termasuk target waktu, output, dan pembagian tugas
- Melakukan review capaian dan kendala sebagai bahan perbaikan ke depan

25. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Kerja sama yang baik dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan perangkat kecamatan/kelurahan dalam menangani laporan Masyarakat.

Faktor Penghambat Sasaran

- Laporan masyarakat kurang jelas (lokasi, waktu, bukti pendukung) sehingga menyulitkan verifikasi

Upaya Perbaikan

- Membangun hubungan kerja yang harmonis antar pimpinan dan personel instansi

26. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan
- Adanya SOP pelayanan pengaduan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan SDM dalam Urusan Pemerintahan Umum
- Monitoring terhadap kepatuhan terhadap SOP belum berjalan maksimal

Upaya Perbaikan

Meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan

27. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di wilayah Kecamatan Gambut
- Adanya Peningkatan kapasitas aparatur desa.

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan kompetensi aparatur desa
- Minimnya perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang arsip yang memadai
- Dokumentasi pelaporan tidak terdokumentasi dengan baik

Upaya Perbaikan

- Menyediakan daftar kelengkapan administrasi sebagai alat kontrol dan evaluasi

- Memberikan apresiasi kepada desa dengan tata kelola administrasi terbaik sebagai motivasi peningkatan kinerja

28. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di wilayah Kecamatan Gambut
- Adanya agenda pembinaan, evaluasi, dan kunjungan lapangan yang terencana.

Faktor Penghambat Sasaran

- Jumlah personel Kecamatan yang terbatas dibandingkan dengan jumlah desa binaan
- Data dan laporan masih manual sehingga menyulitkan evaluasi secara cepat dan akurat

Upaya Perbaikan

- Memprioritaskan desa dengan tingkat permasalahan atau risiko tinggi
- Memberikan apresiasi kepada desa dengan tata kelola administrasi terbaik sebagai motivasi peningkatan kinerja

29. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut) dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Peran aktif Lurah Gambut dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Dukungan dari kecamatan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal dalam mendukung program pemberdayaan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan masyarakat dan faktor ekonomi
- Koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Upaya Perbaikan

- Melakukan penilaian terhadap efektivitas kegiatan pemberdayaan dan dampaknya bagi masyarakat
- Mengadakan rapat koordinasi berkala antara Lurah, perangkat kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan

30. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Koordinasi yang baik dengan lembaga kemasyarakatan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, RT/RW, dan karang taruna dalam penyelesaian permasalahan
- Dukungan dari kecamatan dan perangkat daerah terkait.

Faktor Penghambat Sasaran

- Beberapa pengaduan harus dikoordinasikan ke tingkat kecamatan atau perangkat daerah lain
- Dokumentasi pengaduan masih manual sehingga rawan keterlambatan pelaporan.

Upaya Perbaikan

- Menjalin komunikasi intensif dengan kecamatan dan perangkat daerah untuk percepatan tindak lanjut

31. Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Aparatur kelurahan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, terutama jika keadaan sering hujan halaman Kelurahan tergenang air
- Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam.

Upaya Perbaikan

Sosialisasi aktif melalui RT/RW dan lembaga kemasyarakatan

32. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, dan RT/RW dalam mendukung kelancaran pelayanan pemberdayaa

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, terutama jika keadaan sering hujan halaman Kelurahan tergenang air

- Tidak semua warga memahami alur pelayanan atau persyaratan administrasi.

Upaya Perbaikan

Pengadaan perangkat pendukung pelayanan dan peningkatan kualitas ruang pelayanan

33. Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komitmen pimpinan dan perangkat kelurahan
- Penggunaan sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah untuk meningkatkan akurasi dan transparansi

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan kapasitas SDM dalam perencanaan dan evaluasi
- Evaluasi lebih berfokus pada realisasi fisik dan keuangan dibanding outcome
- Ketidakselarasan dokumen Kelurahan terhadap dokumen Kecamatan

Upaya Perbaikan

- Penguatan koordinasi dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait
- Memastikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaporan terdokumentasi secara digital
- Melakukan review triwulanan terhadap capaian program dan realisasi anggaran

34. Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Dokumen

Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Laporan realisasi anggaran dan administrasi keuangan disampaikan sesuai jadwal
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan secara tertib

Faktor Penghambat Sasaran

- Belum tertibnya pengelolaan keuangan di Kelurahan
- Dokumen dari pelaksana kegiatan tidak selalu disampaikan tepat waktu

Upaya Perbaikan

- Melakukan pengecekan berkala atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian pencatatan
- Koordinasi intensif dengan kecamatan dan BPKPAD

35. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Terjalinnnya komunikasi yang baik antara Lurah, Sekretaris, dan seluruh staf di Kelurahan Gambut
- Tersedianya ruang kerja, peralatan administrasi, dan fasilitas pendukung pelayanan

Faktor Penghambat Sasaran

- Pegawai harus menangani beberapa pekerjaan sekaligus sehingga berpotensi menurunkan efektivitas
- Beban administrasi yang tinggi

Upaya Perbaikan

- Mengoptimalkan peran masing-masing pegawai sesuai tupoksi
- Melaksanakan rapat internal secara berkala untuk memantau progres kegiatan

36. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) berdasarkan analisis kebutuhan riil
- Pencatatan barang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik

Faktor Penghambat Sasaran

- Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dalam satu tahun anggaran
- Barang mengalami penurunan fungsi akibat usia pakai

Upaya Perbaikan

- Mengutamakan barang yang mendukung pelayanan publik dan operasional utama
- Pemutakhiran data inventaris secara berkala

37. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut) dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Identifikasi kebutuhan jasa (listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, dan jasa lainnya) dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional kantor
- Dukungan anggaran dalam DPA memungkinkan pembayaran jasa penunjang secara tepat waktu

Faktor Penghambat Sasaran

- Kenaikan tarif jasa dapat mempengaruhi kecukupan anggaran

- Pemakaian berlebihan dapat meningkatkan beban biaya

Upaya Perbaikan

- Pembayaran tagihan tepat waktu
- Melakukan review realisasi belanja jasa penunjang setiap triwulan

38. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Lurah dan perangkat kelurahan mendorong dialog terbuka serta memberikan ruang penyampaian aspirasi
- Usulan masyarakat dibahas secara terbuka dan disampaikan kembali hasil prioritasnya.

Faktor Penghambat Sasaran

- Tidak semua usulan dapat diakomodir sehingga dapat menurunkan antusiasme warga
- Usulan yang belum terealisasi dapat menimbulkan persepsi kurang efektifnya forum

Upaya Perbaikan

- Memberikan pemahaman mengenai kewenangan, prioritas, dan mekanisme pengusulan
- Mengukur jumlah kehadiran dan kualitas usulan sebagai indikator peningkatan partisipasi

39. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang

Terbangun dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Pelaksanaan teknis didukung oleh instansi terkait sehingga sesuai spesifikasi
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan

Faktor Penghambat Sasaran

- Kondisi cuaca, lokasi, atau keterbatasan akses dapat menghambat pekerjaan
- Risiko kerusakan apabila tidak dirawat secara berkelanjutan

Upaya Perbaikan

- Melakukan pengecekan progres fisik serta kualitas pekerjaan

40. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan / Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Upaya Perbaikan

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

41. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lurah Gambut)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial /

Kelurahan Gambut) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Upaya Perbaikan

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

42. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lurah Gambut Barat) dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahandengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Peran aktif Lurah Gambut Barat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Dukungan dari kecamatan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal dalam mendukung program pemberdayaan.

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan masyarakat dan faktor ekonomi
- Koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Upaya Perbaikan

- Melakukan penilaian terhadap efektivitas kegiatan pemberdayaan dan dampaknya bagi Masyarakat

- Mengadakan rapat koordinasi berkala antara Lurah, perangkat kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan

43. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Koordinasi yang baik dengan lembaga kemasyarakatan seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, RT/RW, dan karang taruna dalam penyelesaian permasalahan
- Dukungan dari kecamatan dan perangkat daerah terkait.

Faktor Penghambat Sasaran

- Beberapa pengaduan harus dikoordinasikan ke tingkat kecamatan atau perangkat daerah lain
- Dokumentasi pengaduan masih manual sehingga rawan keterlambatan pelaporan.

Upaya Perbaikan

Menjalin komunikasi intensif dengan kecamatan dan perangkat daerah untuk percepatan tindak lanjut

44. Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Aparatur kelurahan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
- Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam.

Upaya Perbaikan

Sosialisasi aktif melalui RT/RW dan lembaga kemasyarakatan

45. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan rah Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, dan RT/RW dalam mendukung kelancaran pelayanan pemberdayaa

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
- Tidak semua warga memahami alur pelayanan atau persyaratan administrasi.

Upaya Perbaikan

Pengadaan perangkat pendukung pelayanan dan peningkatan kualitas ruang pelayanan

46. Meningkatkan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

daerah sesuai ketentuan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Komitmen pimpinan dan perangkat kelurahan
- Penggunaan sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah untuk meningkatkan akurasi dan transparansi

Faktor Penghambat Sasaran

- Keterbatasan kapasitas SDM dalam perencanaan dan evaluasi
- Evaluasi lebih berfokus pada realisasi fisik dan keuangan dibanding outcome
- Ketidakselarasan dokumen Kelurahan terhadap dokumen Kecamatan

Upaya Perbaikan

- Penguatan koordinasi dengan kecamatan dan perangkat daerah terkait
- Memastikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaporan terdokumentasi secara digital

Melakukan review triwulanan terhadap capaian program dan realisasi anggaran

47. Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Laporan realisasi anggaran dan administrasi keuangan disampaikan sesuai jadwal
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan secara tertib

Faktor Penghambat Sasaran

- Belum tertibnya pengelolaan keuangan di Kelurahan
- Dokumen dari pelaksana kegiatan tidak selalu disampaikan tepat waktu

Upaya Perbaikan

- Melakukan pengecekan berkala atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian pencatatan

Koordinasi intensif dengan kecamatan dan BPKPAD

48. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Terjalannya komunikasi yang baik antara Lurah, Sekretaris, dan seluruh staf di Kelurahan Gambut Barat
- Tersedianya ruang kerja, peralatan administrasi, dan fasilitas pendukung pelayanan

Faktor Penghambat Sasaran

- Pegawai harus menangani beberapa pekerjaan sekaligus sehingga berpotensi menurunkan efektivitas
- Beban administrasi yang tinggi

Upaya Perbaikan

- Mengoptimalkan peran masing-masing pegawai sesuai tupoksi
- Melaksanakan rapat internal secara berkala untuk memantau progres kegiatan

49. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) berdasarkan analisis kebutuhan riil

- Pencatatan barang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik

Faktor Penghambat Sasaran

- Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dalam satu tahun anggaran
- Barang mengalami penurunan fungsi akibat usia pakai

Upaya Perbaikan

- Mengutamakan barang yang mendukung pelayanan publik dan operasional utama
- Pemutakhiran data inventaris secara berkala

50. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Identifikasi kebutuhan jasa (listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, dan jasa lainnya) dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional kantor
- Dukungan anggaran dalam DPA memungkinkan pembayaran jasa penunjang secara tepat waktu

Faktor Penghambat Sasaran

- Kenaikan tarif jasa dapat mempengaruhi kecukupan anggaran
- Pemakaian berlebihan dapat meningkatkan beban biaya

Upaya Perbaikan

- Pembayaran tagihan tepat waktu

Melakukan review realisasi belanja jasa penunjang setiap triwulan

51. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Lurah dan perangkat kelurahan mendorong dialog terbuka serta memberikan ruang penyampaian aspirasi
- Usulan masyarakat dibahas secara terbuka dan disampaikan kembali hasil prioritasnya.

Faktor Penghambat Sasaran

- Tidak semua usulan dapat diakomodir sehingga dapat menurunkan antusiasme warga
- Usulan yang belum terealisasi dapat menimbulkan persepsi kurang efektifnya forum

Upaya Perbaikan

- Memberikan pemahaman mengenai kewenangan, prioritas, dan mekanisme pengusulan
- Mengukur jumlah kehadiran dan kualitas usulan sebagai indikator peningkatan partisipasi

52. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Pelaksanaan teknis didukung oleh instansi terkait sehingga sesuai spesifikasi
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan

Faktor Penghambat Sasaran

- Kondisi cuaca, lokasi, atau keterbatasan akses dapat menghambat pekerjaan
- Risiko kerusakan apabila tidak dirawat secara berkelanjutan

Upaya Perbaikan

Melakukan pengecekan progres fisik serta kualitas pekerjaan

53. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemerintahan / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Upaya Perbaikan

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

54. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lurah Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Kesejahteraan Sosial / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Upaya Perbaikan

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

55. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lurah Gambut Barat)

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan Gambut Barat) dengan indikator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan perolehan capaian 100% dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

- Sinergi dengan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat

Faktor Penghambat Sasaran

- Kesibukan warga dalam bekerja membatasi waktu partisipasi
- Rendahnya keterampilan atau pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.

Upaya Perbaikan

- Memberikan pembinaan rutin kepada RT/RW, LPM, dan organisasi kemasyarakatan

A.7 ANALISA EFISIENSI

Tabel 3 7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	100.28	92.95	7.89
2	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	96.49	3.64

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100.00	94.84	5.44
4	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Admistrasi Umum Perkantoran	100.00	91.86	8.86
5	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	97	3.09
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	87.82	13.87
7	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100.00	97.07	3.02
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100.00	90.85	10.07
9	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	90.85	10.07
10	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100.00	93.8	6.61
11	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.00	87.74	13.97
12	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.00	96.87	3.23
13	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100.00	97.99	2.05
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	98.68	1.34
15	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100.00		
16	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur	Persentase Pelayanan Urusan Ketenteraman dan	100.00		

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA ($\geq 100\%$)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan			
17	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.00	91.99	8.71
18	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitas urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100.00	99.7	0.30
19	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100.00	99.7	0.30
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100.00		
21	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00		
22	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	100.00	81.94	22.04
23	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00	81.94	22.04
24	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95.83	97.29	-1.50
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00		
26	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	100.00		
27	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00		

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
28	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	99.47	0.53
29	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00		
30	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	100.00		
31	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00		
32	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00		
33	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	33.69	196.82
34	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50	100	-50.00
35	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	97.17	2.91
36	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100		
37	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00	96.19	3.96
38	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00		
39	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	100.00		
40	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00		

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
41	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	78.16	27.94
42	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00		
43	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Admistrasi Umum Perkantoran	100.00		
44	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00		
45	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00		
46	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	0	NA
47	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100	99.86	0.14
48	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	96.14	4.01
49	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100		
50	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100		

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi antara persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **efisien hingga sangat efisien**.

Mayoritas indikator mencapai capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 100%, sehingga menghasilkan nilai

efisiensi positif. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang optimal dan hemat.

Beberapa indikator bahkan menunjukkan tingkat efisiensi sangat tinggi, terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam Musrenbang Kelurahan. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan fisik yang menunjukkan efisiensi negatif akibat capaian output yang belum optimal dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, pengelolaan program dan anggaran Tahun 2025 telah mencerminkan prinsip **efektivitas, efisiensi, dan value for money** dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan/Kelurahan

A.8 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam pencapaian target sasaran kinerja ada program dan kegiatan yang mendukung. Adapun beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh beberapa Program yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktivitas yang dilakukan adalah :

- a. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan
- b. Melakukan rapat internal terkait Layanan Kecamatan agar masyarakat tidak dipersulit dalam memperoleh pelayanan dan transparan
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan melalui rapat internal terhadap petugas pelayanan
- d. Mendorong pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala

- e. Menyapa langsung masyarakat pengguna layanan dan menanyakan pengalaman mereka mendapatkan pelayanan di Kecamatan Martapura
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengaduan yang masuk ke Kecamatan

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi upaya penyelenggaraan trantibum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Mengkoordinasikan pelayanan publik dan penguatan standar pelayanan
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa
- c. Menengahi permasalahan desa, termasuk batas wilayah dan konflik sosial
- d. Memimpin koordinasi lintas sektoral melalui Forkopimcam dan rapat koordinasi rutin dengan desa
- e. Melakukan pembinaan Linmas
- f. Melakukan penanganan cepat terhadap kerawanan sosial di masyarakat
- g. Membangun relasi sosial dan harmonisasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, Polsek, Danramil dan LPM

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan evaluasi terhadap Nilai SAKIP tahun sebelumnya
- b. Melaksanakan rapat internal AKIP Tahun 2025 lingkup Kecamatan Gambut
- c. Melakukan sosialisasi AKIP kepada seluruh pegawai Kecamatan Gambut agar memahami pentingnya akuntabilitas

- d. Memastikan kelengkapan data dukung komponen yang masuk dalam penilaian AKIP Tahun 2025

4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Melaksanakan rapat internal Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
- b. Melakukan sosialisasi Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai Kecamatan Gambut
- c. Memastikan kelengkapan data dukung komponen kinerja utama, kepatuhan dan kinerja pelayanan publik
- d. Memberikan arahan kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk kelengkapan data dukung IKKI yang masih belum lengkap
- e. Melakukan evaluasi secara berkala

5. Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan didukung oleh sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah didukung oleh aktivitas sebagai berikut :
 - a. Camat Gambut membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Perencanaan ;
 - b. Pengumpulan Data dan Informasi oleh Tim Kecamatan Gambut yang memiliki sumber dari data statistik, hasil evaluasi kinerja sebelumnya, kebijakan pemerintah daerah, dan dokumen perencanaan lainnya ;

- c. Analisis situasi data dan informasi yang sudah dikumpulkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai dasar perumusan dokumen perencanaan ;
- d. Konsultasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- e. Revisi dokumen terhadap draf dokumen berdasarkan masukan dan saran yang diperoleh dari konsultasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait;
- f. Finalisasi Dokumen Perencanaan yang telah disetujui oleh Camat Gambut;
- g. Dokumentasi dan pelaporan dokumen perencanaan yang telah final.
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD didukung oleh aktivitas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait hasil capaian kinerja.
 - b. Analisis data dan informasi yang sudah dikumpulkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai dasar perumusan dokumen perencanaan;
 - c. Penyusunan laporan capaian kinerja Kecamatan Gambut, mulai dari persiapan hingga finalisasi;
 - d. Finalisasi laporan capaian kinerja yang disetujui oleh Camat Gambut
 - e. Melakukan dokumentasi dan pelaporan laporan capaian kinerja yang telah final.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait hasil evaluasi realisasi fisik dan keuangan;
 - b. Melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat tentang penyampaian pendorong dan penghambat dalam pencapaian realisasi fisik dan keuangan;
 - c. Menyusun draft laporan evaluasi kinerja;
 - d. Melakukan penginputan realisasi fisik dan keuangan beserta data-data pendukung lainnya ke dalam aplikasi SIMONDALEV;

e. Dokumentasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

6. Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan sub kegiatan

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, yang didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Menyusun kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN berdasarkan jumlah pegawai, golongan, jabatan, masa kerja dan peraturan yang berlaku;
 - b. Memverifikasi data ASN yang telah disusun;
 - c. Melakukan Perhitungan gaji dan tunjangan berdasarkan golongan, jabatan, dan masa kerja ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
 - e. Penyusunan laporan yang berisi realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN;
 - f. Pertanggungjawaban tentang laporan keuangan, bukti-bukti pembayaran dan dokumen-dokumen yang relevan.
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, yang didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran dalam menyusun rencana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Verifikasi dan validasi data penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
 - c. Perhitungan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Pembayaran penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
 - e. Penyusunan laporan yang berisi realisasi anggaran untuk penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
 - f. Pertanggungjawaban tentang laporan keuangan, bukti-bukti pembayaran dan dokumen-dokumen yang relevan

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Sub Bagian Keuangan mengidentifikasi data dan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Data ini meliputi data keuangan (misalnya, realisasi anggaran dan belanja) dan data non-keuangan (misalnya, data kinerja, data pegawai);
 - b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yaitu BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk memastikan data untuk penyusunan Laporan Keuangan telah memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data laporan keuangan;
 - d. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang telah diolah;
 - e. Review dan koreksi oleh BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan terhadap laporan keuangan yang telah disusun;
 - f. Penyampaian draf laporan keuangan kepada BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - g. Penyampaian laporan keuangan yang telah final kepada BPKPAD Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

7. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah

- a. Sub Bagian Aset mengidentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yaitu BPKPAD Bidang Aset untuk memastikan data untuk rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan barang milik daerah;
- e. Review dan koreksi laporan barang milik daerah oleh BPKPAD Bidang Aset;

- f. Penyampaian laporan barang milik daerah per Triwulan kepada BPKPAD Bidang Aset;
- g. Evaluasi terhadap seluruh proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah

8. Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :

- Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, didukung oleh beberapa aktifitas yaitu :
 - a. Camat Gambut membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Kepegawaian;
 - b. Tim mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab pegawai;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan mencakup jadwal kegiatan, metode pengumpulan data dan melibatkan SKPD yang terlibat seperti BKPSDM Kabupaten Banjar;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja pegawai;
 - e. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai;
 - f. Pemberian *reward and punishment* terhadap pegawai yang memiliki kinerja terbaik dan memberikan sanksi jika terdapat pegawai yang melanggar aturan;
 - g. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, didukung oleh beberapa aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk pelaksanaan bimbingan teknis;
 - b. Penyusunan rencana pelaksanaan bimbingan teknis mencakup tujuan, materi, jadwal, narasumber dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis oleh pihak-pihak terkait atau instansi terkait lainnya;
 - d. Implementasi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari bimbingan teknis.

9. Terselenggaranya kegiatan kantor

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan;
 - b. Penyusunan rencana mencakup jenis komponen yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi teknis, anggaran, jadwal yang dibutuhkan serta kriteria pemilihan;
 - c. Pemesanan dan pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan melalui penyedia terpilih;
 - d. Pelaksanaan pemasangan dan pengujian komponen instalasi listrik dan penerangan;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja komponen instalasi listrik dan penerangan.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu :
 - a. Identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - b. Penyusunan rencana mencakup jenis peralatan dan perlengkapan, jumlah dan spesifikasi teknis;
 - c. Pemesanan dan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor melalui penyedia terpilih;
 - d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data peralatan dan perlengkapan kantor, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi kebutuhan peralatan rumah tangga;
 - b. Penyusunan rencana mencakup jenis peralatan rumah tangga, jumlah dan spesifikasi teknis;
 - c. Pemesanan dan pembelian peralatan rumah tangga melalui penyedia terpilih;

- d. Pelaksanaan penataan dan penggunaan peralatan rumah tangga;
- e. Pemeliharaan peralatan rumah tangga;
- f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data rumah tangga, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja peralatan rumah tangga.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan mencakup jenis barang cetakan dan penggandaan, jumlah dan spesifikasi teknis;
 - c. Pemesanan dan pembelian barang cetakan dan penggandaan melalui penyedia terpilih;
 - d. Evaluasi penggunaan anggaran dan pemeliharaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar barang cetakan dan penggandaan, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja barang cetakan dan penggandaan.
- Fasilitasi kunjungan tamu, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Penerimaan informasi mengenai rencana kunjungan tamu;
 - b. Koordinasi internal untuk memastikan ketersediaan informasi, ruangan, peralatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan;
 - c. Persiapan materi dan pengaturan logistik dalam fasilitasi kunjungan tamu;
 - d. Penyambutan, registrasi dan kunjungan oleh tamu yang difasilitasi;
 - e. Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh tamu;
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar tamu yang hadir, hasil diskusi, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan umpan balik dari tamu.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Identifikasi tujuan rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD;

- c. Penyusunan laporan mencakup hasil rapat koordinasi dan konsultasi, keputusan yang diambil dan tugas-tugas yang perlu ditindaklanjuti.
- Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, didukung oleh beberapa aktivitas yaitu:
 - a. Camat Gambut membentuk Tim Arsip Kecamatan Gambut;
 - b. Membuat klasifikasi arsip sesuai jenis, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset dan kegiatan;
 - c. Menerima arsip dari unit di SKPD;
 - d. Melakukan pencatatan arsip masuk ke dalam register atau aplikasi informasi kearsipan;
 - e. Memberikan kode klasifikasi dan nomor arsip.

10. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah dengan sub kegiatan

- Pengadaan Mebel, didukung oleh aktivitas yaitu :
 - a. Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel;
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis mebel, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis mebel;
 - c. Pemesanan dan pembelian mebel melalui penyedia terpilih;
 - d. Penataan dan penggunaan mebel;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, didukung oleh aktivitas yaitu :
 - a. Identifikasi kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin;
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis peralatan dan mesin, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis peralatan dan mesin;
 - c. Pemesanan dan pembelian peralatan dan mesin melalui penyedia terpilih;
 - d. Penataan dan penggunaan peralatan dan mesin;
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar peralatan dan mesin yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan peralatan dan mesin.

11. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan aktifitas sebagai berikut :
 - a. Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat (belanja meterai)
 - b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis jasa surat menyurat (belanja meterai)
 - c. Pemesanan dan pembelian jasa surat menyurat (belanja meterai) melalui penyedia terpilih
 - d. Penataan dan penggunaan jasa surat menyurat (belanja meterai)
 - e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, informasi penyedia jasa pos, jumlah meterai yang dibeli, anggaran yang digunakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan aktifitas sebagai berikut :
 - a. Identifikasi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - b. Berlangganan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyedia yang telah dipilih
 - c. Penggunaan layanan komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - d. Pemeliharaan rutin terhadap instalasi dan peralatan yang terkait dengan penyediaan jasa
 - e. Membayar tagihan layanan secara tepat waktu
 - f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar penyedia jasa yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis jasa dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan aktifitas sebagai berikut :
 - a. dentifikasi dan verifikasi data pegawai non-ASN yang berhak menerima honorarium dan BPJS
 - b. Menghitung besaran honorarium dan iuran BPJS masing-masing pegawai yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - c. Penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium dan iuran BPJS

- d. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS
- e. Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan

12. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan

- Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Mendata kendaraan dinas operasional atau lapangan yang menjadi asset SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan
 - c. Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar kendaraan yang dipelihara, rincian biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan terhadap seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki SKPD
 - b. Analisis kebutuhan terkait pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - d. Pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan

- f. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar peralatan dan mesin yang dipelihara, jenis pemeliharaan yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan aktifitas sebagai berikut:
 - a. Identifikasi terhadap kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan pada gedung kantor dan bangunan lainnya
 - b. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya secara berkala baik pemeliharaan rutin maupun perbaikan jika ada kerusakan
 - c. Pembayaran pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan
 - e. Penyusunan laporan mencakup pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik, realisasi anggaran, jadwal, dokumentasi yang relevan dan kendala yang dihadapi

13. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan subkegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan peninjauan dan pembaruan Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh jenis pelayanan di kecamatan
- b. Memastikan kelengkapan fasilitas ruang pelayanan seperti kursi tunggu, papan informasi, area khusus disabilitas, dan fasilitas kebersihan
- c. Melakukan penyederhanaan alur pelayanan untuk mengurangi birokrasi berlapis
- d. Membangun jejaring dengan instansi vertikal untuk layanan yang memerlukan verifikasi lintas sektor

14. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan sub kegiatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah :

- a. Pelaksanaan Pra Rembuk Stunting dan Rembuk Stunting
- b. Pelaksanaan PHBI (Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan Safari Ramadhan)
- c. Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS)
- d. Pelaksanaan MTQ

15. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya
 - b. Mengorganisir kegiatan musyawarah desa dan forum konsultasi publik untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi
 - c. Menggerakkan tokoh masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan
 - d. Mendorong pengembangan BUMDes dengan memberikan pendampingan administratif, pelaporan, dan manajemen usaha
 - e. Melakukan monitoring rutin ke desa untuk memastikan program pemberdayaan berjalan efektif
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja PKK tingkat kecamatan
 - b. Melakukan monitoring rutin ke Kelurahan/Desa terkait pelaksanaan 10 program pokok PKK
 - c. Berkolaborasi dengan Puskesmas dalam program gizi, kesehatan ibu-anak, posyandu, dan stunting

16. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, aktivitas yang mendukung yaitu :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tahapan Musrenbang Desa
 - b. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Masyarakat gar memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang
 - c. Menyajikan data pembangunan desa (data kemiskinan, infrastruktur, layanan dasar) agar masyarakat memahami prioritas dan ikut terlibat dalam pengambilan Keputusan
 - d. Mengadakan diskusi awal di tingkat dusun/RT untuk merumuskan usulan yang akan dibawa ke Musrenbang Desa
 - e. Mengundang perwakilan perempuan, pemuda, difabel, tokoh masyarakat, dan kelompok miskin agar kehadiran peserta lebih inklusif
 - f. Mengelompokkan usulan berdasarkan bidang (pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan) dan memverifikasi kesesuaian dengan RPJMDes/RKPDes
 - g. Membuat dokumentasi kegiatan, daftar hadir, foto kegiatan, serta rekapitulasi usulan masyarakat sebagai bahan ke kecamatan
 - h. Mengidentifikasi kendala dan tingkat partisipasi masyarakat serta memberikan rekomendasi peningkatan untuk tahun berikutnya
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, aktivitas yang mendukung yaitu :
 - a. Melakukan penyusunan jadwal kegiatan Sosialisasi BUMDES, Pokjnal Posyandu dan Monitoring dan Evaluasi APBDes
 - b. Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi BUMDES, Pokjnal Posyandu dan Monitoring dan Evaluasi APBDes
 - c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang berisi foto kegiatan , daftar hadir, notulen dan hasil kegiatan.

17. Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat.

Aktifitas dari sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja yaitu:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi TP. PKK
- b. Melaksanakan Pembinaan TP.PKK
- c. Mengikuti Jambore PKK

18. Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan kegiatan

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Polsek, Koramil, dan Satpol PP dalam penanganan cepat gangguan ketertiban
 - b. Fasilitasi mediasi konflik sosial dan perselisihan warga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa
 - c. Mengawasi ketertiban kegiatan masyarakat seperti acara besar, pasar malam, kegiatan kepemudaan, dan keramaian untuk memastikan izin dan standar keamanan dipenuhi
 - d. Menggerakkan LINMAS/Poskamling desa untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ketertiban umum, seperti larangan miras, kebisingan malam hari, dan pengelolaan lingkungan aman melalui sosialisasi perda/perkada

19. Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Membentuk Forkopimcam melalui usulan Camat
 - b. Menyusun jadwal kegiatan rapat Forkopimcam
 - c. Memfasilitasi kegiatan rapat Forkopimcam
 - d. Mengelola administrasi Forkopimcam
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - b. Melakukan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan
 - c. Memfasilitasi kegiatan FKUB
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

20. Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Aktifitas dari sasaran kinerja adalah :

- a. Melayani pengaduan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan dengan Babinsa, Kapolsek dan Linmas terkait aduan masyarakat
- c. Mencatat pengaduan dalam buku register

21. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

22. Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada .

23. Meningkatkan koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatkan koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Adapun aktivitas yang mendukung kegiatan ini adalah :

- a. Melakukan pembentukan Panitia Pelaksanaan HUT RI ke-80
- b. Mengkoordinasikan Panitia pelaksanaan HUT RI ke-80

24. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI

Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan tersebut sehingga tercapainya sasaran kinerja adalah :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan HUT RI ke-80
- b. Memfasilitasi kegiatan rapat persiapan dan evaluasi pelaksanaan HUT RI ke-80
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

25. Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti yaitu Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas dari sasaran kinerja adalah :

- a. Melayani pengaduan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan dengan Babinsa, Kapolsek dan Linmas terkait aduan masyarakat
- c. Mencatat pengaduan dalam buku register

26. Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang mendukung sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Aktivitas yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas PMD dan OPD terkait lainnya
- b. Melakukan pendampingan desa dalam penyusunan rencana pembangunan
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

28. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan administrasi Tata Pemerintahan desa
 - b. Pengumpulan data/bahan administrasi tata Pemerintahan Desa
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi administrasi tata Pemerintahan Desa
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan administrasi tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Rapat Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- e. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2025.
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Rapat Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Menyusun jadwal Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa (tata Batas Desa)
 - b. Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa (Tata Batas Desa)
 - c. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa (Tata Batas Desa)
 - d. Pelaksanaan dan Pendampingan Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa (Tata Batas Desa)
 - e. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan kegiatan Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa (Tata Batas Desa)

- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :
 - a. Menyusun jadwal Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
 - b. Pengumpulan Data/Bahan dan Persiapan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
 - c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
 - e. Dokumentasi/pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

29. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut) dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan terkait jadwal Musrenbang dan pedoman serta arah kebijakan pembangunan
 - b. Mengidentifikasi usulan yang sudah terealisasi, belum terealisasi, dan tertunda
 - c. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Kelurahan
 - d. Mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, posyandu, penerangan jalan, balai warga, dll)
 - b. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat masyarakat

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi potensi masyarakat (UMKM, kelompok wanita, karang taruna, kader posyandu, dll)
 - b. Menghimpun usulan melalui RT/RW, LPM, PKK, dan forum Musrenbang
 - c. Menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan manfaat luas
- Evaluasi Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Mengevaluasi Kinerja pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan
 - b. Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Camat

30. Meningkatkan Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat
- b. Menetapkan admin/petugas pencatat pengaduan
- c. Menginformasikan mekanisme pengaduan kepada RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna
- d. Mendisposisikan kepada staf/Tim terkait
- e. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai batas waktu

31. Meningkatkan Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi jenis layanan pemberdayaan (rekomendasi bantuan UMKM, fasilitasi pelatihan, pendataan kelompok masyarakat, surat keterangan usaha, dll)
- b. Menginventarisasi kendala akses masyarakat (jarak, waktu pelayanan, kurangnya informasi, prosedur yang rumit)
- c. Menyediakan papan informasi, banner alur pelayanan, dan daftar persyaratan
- d. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

32. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun dan Revisi SOP
- b. Menetapkan dan Mensosialisasikan SOP Baru
- c. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

33. Meningkatkan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Perencanaan Kecamatan terkait dokumen perencanaan Kecamatan, dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja untuk Kelurahan
- b. Menghimpun usulan dari masing-masing seksi di Kelurahan
- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi
- d. Menyampaikan laporan perencanaan, realisasi anggaran dan kinerja yang telah diketahui Lurah kepada Camat

34. Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengusulkan dan memastikan penetapan PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan
- b. Memeriksa kelengkapan SPP, SPM, dan dokumen pendukung
- c. Melakukan rekonsiliasi internal antara realisasi fisik dan keuangan
- d. Menyusun laporan realisasi anggaran bulanan/triwulan
- e. Mengarsipkan dokumen SPP, SPM, SPJ, dan bukti setor pajak

35. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan kantor;
- b. Penyusunan rencana mencakup jenis komponen yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi teknis, anggaran, jadwal yang dibutuhkan serta kriteria pemilihan;
- c. Pemesanan dan pembelian kebutuhan kantor melalui penyedia terpilih;

- d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja

36. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel/peralatan/mesin;
- b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis mebel/peralatan/mesin, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis mebel/peralatan/mesin;
- c. Pemesanan dan pembelian mebel/peralatan/mesin melalui penyedia terpilih;
- d. Penataan dan penggunaan mebel/peralatan/mesin
- e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel/peralatan/mesin

37. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :

- a. Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
- b. Identifikasi dan verifikasi data pegawai non-ASN yang berhak menerima honorarium dan BPJS
- c. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, informasi penyedia jasa pos, jumlah meterai yang dibeli, anggaran yang digunakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Berlangganan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyedia yang telah dipilih
- e. Penggunaan layanan komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- f. Membayar tagihan layanan secara tepat waktu
- g. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar penyedia jasa yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis jasa dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan
- h. Menghitung besaran honorarium dan iuran BPJS masing-masing pegawai yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku

- i. Penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- j. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS
- k. Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- l. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan

38. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
 - b. Pengumpulan data/usulan Musrenbang dari warga / lembaga kemasyarakatan
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
 - d. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

39. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- f. Mengidentifikasi kebutuhan warga melalui forum diskusi untuk menentukan prioritas sarana (jalan/drainase/taman/dll)
- g. Koordinasi dengan RT/RW, tokoh masyarakat serta instansi teknis
- h. Membentuk tim monitoring dari unsur kelurahan dan masyarakat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

40. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)

- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

41. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

42. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat) dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan terkait jadwal Musrenbang dan pedoman serta arah kebijakan pembangunan
 - b. Mengidentifikasi usulan yang sudah terealisasi, belum terealisasi, dan tertunda
 - c. Melaksanakan kegiatan Musrenbang Kelurahan
 - d. Mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, posyandu, penerangan jalan, balai warga, dll)
 - b. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat masyarakat

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Menginventarisasi potensi masyarakat (UMKM, kelompok wanita, karang taruna, kader posyandu, dll)
 - b. Menghimpun usulan melalui RT/RW, LPM, PKK, dan forum Musrenbang
 - c. Menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan manfaat luas
- Evaluasi Kelurahan, aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:
 - a. Mengevaluasi Kinerja pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan
 - b. Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Camat

43. Meningkatkan Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun SOP penanganan pengaduan masyarakat
- b. Menetapkan admin/petugas pencatat pengaduan
- c. Menginformasikan mekanisme pengaduan kepada RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna
- d. Mendisposisikan kepada staf/Tim terkait
- e. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai batas waktu

44. Meningkatkan Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi jenis layanan pemberdayaan (rekomendasi bantuan UMKM, fasilitasi pelatihan, pendataan kelompok masyarakat, surat keterangan usaha, dll)
- b. Menginventarisasi kendala akses masyarakat (jarak, waktu pelayanan, kurangnya informasi, prosedur yang rumit)
- c. Menyediakan papan informasi, banner alur pelayanan, dan daftar persyaratan
- d. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

45. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun dan Revisi SOP
- b. Menetapkan dan Mensosialisasikan SOP Baru
- c. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

46. Meningkatkan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Perencanaan Kecamatan terkait dokumen perencanaan Kecamatan, dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja untuk Kelurahan
- b. Menghimpun usulan dari masing-masing seksi di Kelurahan
- c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi
- d. Menyampaikan laporan perencanaan, realisasi anggaran dan kinerja yang telah diketahui Lurah kepada Camat

47. Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas(Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengusulkan dan memastikan penetapan PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan
- b. Memeriksa kelengkapan SPP, SPM, dan dokumen pendukung
- c. Melakukan rekonsiliasi internal antara realisasi fisik dan keuangan
- d. Menyusun laporan realisasi anggaran bulanan/triwulan

48. Terselenggaranya kegiatan kantor (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan kantor;
- b. Penyusunan rencana mencakup jenis komponen yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi teknis, anggaran, jadwal yang dibutuhkan serta kriteria pemilihan;
- c. Pemesanan dan pembelian kebutuhan kantor melalui penyedia terpilih;
- d. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, data komponen, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja

49. Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan pengadaan mebel/peralatan/mesin;
- b. Penyusunan daftar kebutuhan seperti jenis mebel/peralatan/mesin, jumlah dan spesifikasi teknis setiap jenis mebel/peralatan/mesin;
- c. Pemesanan dan pembelian mebel/peralatan/mesin melalui penyedia terpilih;
- d. Penataan dan penggunaan mebel/peralatan/mesin
- e. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar mebel yang dibeli, informasi penyedia, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran/belanja pengadaan mebel/peralatan/mesin

50. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu :

- a. Identifikasi kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
- b. Identifikasi dan verifikasi data pegawai non-ASN yang berhak menerima honorarium dan BPJS
- c. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, informasi penyedia jasa pos, jumlah meterai yang dibeli, anggaran yang digunakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Berlangganan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyedia yang telah dipilih
- e. Penggunaan layanan komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- f. Membayar tagihan layanan secara tepat waktu
- g. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar penyedia jasa yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis jasa dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan
- h. Menghitung besaran honorarium dan iuran BPJS masing-masing pegawai yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku
- i. Penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum untuk pembayaran honorarium dan iuran BPJS

- j. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) honorarium dan iuran BPJS
- k. Proses pembayaran honorarium dan iuran BPJS
- l. Penyusunan laporan mencakup ringkasan kegiatan, daftar pegawai non-ASN yang menerima honorarium dan BPJS dan besaran honorarium dan iuran BPJS yang dibayarkan

51. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
- b. Pengumpulan data/usulan Musrenbang dari warga / lembaga kemasyarakatan
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
- d. Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

52. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan warga melalui forum diskusi untuk menentukan prioritas sarana (jalan/drainase/taman/dll)
- b. Koordinasi dengan RT/RW, tokoh masyarakat serta instansi teknis
- c. Membentuk tim monitoring dari unsur kelurahan dan masyarakat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

53. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

54. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

55. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)

Aktivitas yang mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Penyediaan upah jasa/insentif kader LPM, Linmas, RT/RW, Puskesmas)
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
- c. Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan dan mesin kantor
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

A.9 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

EVALUASI KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 dengan Nomor 700.1.2/79/LHE/P.Kin/II/ITDA tanggal 30 Oktober 2025 memperoleh nilai 76,82 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. Dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 25,20 dari nilai maksimal 30.

Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah tersedia memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan

target jangka menengah serta target tahunan dan telah menggunakan penyesuaian (*cascading*) dengan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Kecamatan Gambut juga telah menyusun rencana aksi kinerja yang memuat aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja yang ingin dicapai. Pemantauan kinerja dilakukan setiap triwulan yang menjadi dasar dalam perbaikan kinerja selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi, Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai serta belum sepenuhnya diinternalisasi kepada setiap Pegawai untuk dipahami dan menjadi kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 21,95 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melakukan Pengukuran Kinerja pada seluruh sasaran kinerja yang direncanakan sesuai dengan definisi operasional dan didukung dengan data kinerja yang memadai. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Pengukuran kinerja yang dilakukan belum dilakukan secara berjenjang serta belum didukung dengan dokumen yang andal;
- b) Pemantauan dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara optimal dan berkala dalam rangka penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja ;
- c) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*); dan
- d) Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan optimal, dimana masih terdapat data yang belum terisi lengkap dan memadai.

3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai 11,46 dari nilai maksimal 15. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a) Pelaporan kinerja belum disusun secara berkala berdasarkan hasil pemantauan evaluasi dan kinerja;
- b) Reviu berjenjang dalam penyusunan laporan kinerja belum sepenuhnya menjamin laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- c) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja serta menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4) Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 18,22 dari nilai maksimal 25. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja yang dituangkan dalam Penilaian Mandiri AKIP Internal dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Evaluasi Internal belum sepenuhnya dilakukan oleh sumber daya manusia yang memadai dan dilakukan secara mendalam, berjenjang dan berkelanjutan dan dilengkapi dengan bukti dukung hasil evaluasi yang relevan dan memadai;
- b) Evaluasi Internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) yang tersedia serta telah memanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka direkomendasikan kepada Camat Gambut Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada <https://esakip.banjarkab.go.id> dan <https://esr.menpan.go.id> ;
2. Melakukan internalisasi SAKIP kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan menyelaraskan sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan dokumen perjanjian kinerja serta indikator kinerja utama;
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran kinerja yang disertai dengan analisis yang memadai berdasarkan data dukung yang handal;
4. Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi SIMONDALEV serta menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment;
5. Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya;
6. Melaporkan seluruh kinerja yang diperjanjikan ke dalam laporan kinerja secara berkala berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan memuat analisis secara memadai untuk setiap jenjang kinerja;
7. Melakukan reviu berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
8. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti

keselarasan kinerja, indikator dan target, serta konsistensi penyajian informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Berkala dan Tahunan.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Gambut telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

Tabel 3 8 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN
1	Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada https://esakip.banjarkab.go.id dan https://esr.menpan.go.id	Akan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada esakip dan esr.menpan	Oktober 2025
2	Melakukan internalisasi SAKIP kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan menyelaraskan sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan dokumen perjanjian kinerja serta indikator kinerja utama	Akan disusunnya sasaran kinerja pegawai (SKP) yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)	April 2026
3	Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran kinerja yang disertai dengan analisis yang memadai berdasarkan data dukung yang handal	Telah memanfaatkan pengukuran kinerja melalui Aplikasi SIMONDALEV	Desember 2025
4	Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan berdasarkan data yang handal serta melaporkannya ke dalam laporan kinerja dan aplikasi SIMONDALEV serta menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment	- Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui Aplikasi SIMONDALEV	Desember 2025
		- Akan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment	April 2026
5	Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya	Akan melakukan reviu berjenjang terhadap laporan kinerja	April 2026
6	Melaporkan seluruh kinerja yang diperjanjikan ke dalam laporan kinerja secara berkala berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan memuat analisis secara memadai untuk setiap jenjang kinerja	Akan melaporkan seluruh kinerja yang diperjanjikan ke dalam laporan kinerja	April 2026

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN
7	Melakukan reviu berjenjang untuk memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Akan melakukan reviu berjenjang terhadap laporan kinerja	April 2026
8	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam untuk mendeteksi kelemahan dalam akuntabilitas kinerja seperti keselarasan kinerja, indikator dan target, serta konsistensi penyajian informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Berkala dan Tahunan	Telah melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal	Januari 2026

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Gambut tahun 2025 adalah sebesar Rp 7,265,730,340,- dengan realisasi anggaran Rp. 6,819,682,274 ,- (93,86%) dengan rincian untuk Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 6,136,358,340,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 5,715,571,079,- (93,14%) dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1,129,372,000,- dengan realisasi sebesar Rp 1,104,111,195,- (97,76%).

Tabel 3 9 Realisasi Jenis Belanja

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	BELANJA OPERASI	7,265,730,340	6,819,682,274	93.86
	a. BELANJA PEGAWAI	6,136,358,340	5,715,571,079	93.14
	b. BELANJA BARANG DAN JASA	2,353,808,340	2,224,996,878	94.53
	c. BELANJA HIBAH	-	-	-
2	BELANJA MODAL	1,129,372,000	1,104,111,195	97.76

Adapun untuk realiasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3 10 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gambut

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	KECAMATAN GAMBUT	7,265,730,340	6,819,682,274	93.86
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,214,003,000	4,846,199,876	92.95
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,245,000	12,779,900	96.49
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,380,000	5,125,400	95.27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,785,000	3,609,500	95.36
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,080,000	4,045,000	99.14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,840,580,000	3,548,361,101	92.39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,770,300,000	3,478,974,201	92.27
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69,280,000	68,432,300	98.78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,000,000	954,600	95.46
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,250,000	13,514,300	94.84
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,250,000	13,514,300	94.84
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16,080,000	15,245,800	94.81
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,080,000	4,060,000	99.51
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000	11,185,800	93.22
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,641,000	189,816,300	91.86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,455,000	2,406,000	98.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,365,000	33,150,250	96.47
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,521,000	6,945,500	92.35
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,700,000	7,110,000	73.30
	Fasilitas Kunjungan Tamu	5,000,000	4,590,000	91.80
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134,200,000	122,732,050	91.45
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13,400,000	12,882,500	96.14

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394,090,000	382,284,178	97.00
	Pengadaan Mebel	5,864,000	5,670,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	388,226,000	376,614,178	97.01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254,457,000	223,457,176	87.82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,262,000	66,545,720	69.13
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,195,000	151,911,456	99.16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474,660,000	460,741,121	97.07
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116,160,000	113,704,621	97.89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,240,000	12,957,000	97.86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345,260,000	334,079,500	96.76
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	161,026,000	146,300,000	90.85
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	161,026,000	146,300,000	90.85
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	161,026,000	146,300,000	90.85
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	97,632,000	91,575,200	93.80
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32,886,000	28,855,200	87.74
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,352,000	10,560,200	93.03
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21,534,000	18,295,000	84.96
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	64,746,000	62,720,000	96.87
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	64,746,000	62,720,000	96.87

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	29,880,000	29,280,000	97.99
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26,820,000	26,465,000	98.68
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23,760,000	23,720,000	99.83
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,060,000	2,745,000	89.71
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,060,000	2,815,000	91.99
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,060,000	2,815,000	91.99
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99,650,000	99,353,000	99.70
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,650,000	99,353,000	99.70
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99,650,000	99,353,000	99.70
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,075,000	16,449,900	81.94
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,075,000	16,449,900	81.94
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4,037,000	3,325,200	82.37
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,037,000	3,411,000	84.49
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4,037,000	3,230,700	80.03
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4,037,000	2,949,000	73.05
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3,927,000	3,534,000	89.99
KELURAHAN GAMBUT				

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	913,900,920	888,727,870	97.25
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	913,900,920	888,727,870	97.25
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10,152,000	3,570,000	35.17
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200,000,000	200,000,000	100.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	619,773,920	602,212,270	97.17
	Evaluasi Kelurahan	83,975,000	82,945,600	98.77
KELURAHAN GAMBUT BARAT				
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	729,563,420	701,796,428	96.19
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	729,563,420	701,796,428	96.19
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,645,000	0	0.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200,000,000	199,727,300	99.86
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	514,938,420	495,050,628	96.14
	Evaluasi Kelurahan	8,980,000	7,018,500	78.16

Sumber : Laporan Realiasi Anggaran Aplikasi SIPD SILANGKAR Kecamatan Gambut Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 93,86%. Sebagian besar program strategis terealisasi di atas 90%, terutama pada aspek perencanaan, pengelolaan aset, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan pemerintahan umum. Capaian di tingkat kelurahan juga tergolong optimal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan, khususnya pada pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta partisipasi Musrenbang, guna mendorong peningkatan kualitas kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.00	89.02	93.71	2,051,727,340	1,973,482,398	96.19
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	97.00	95.42	98.37			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00	76.82	96.03	5,214,003,000	4,846,199,876	92.95
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	88.50	88.75	100.28	5,214,003,000	4,846,199,876	92.95
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	100	100.00	13,245,000	12,779,900	96.49
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00	89.52	89.52	3,840,580,000	3,548,361,101	92.39
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100.00	100	100.00	14,250,000	13,514,300	94.84
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100.00	75	75.00	16,080,000	15,245,800	94.81
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitrasi Umum Perkantoran	100.00	100	100.00	206,641,000	189,816,300	91.86
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	100	100.00	394,090,000	382,284,178	97.00
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	100	100.00	254,457,000	223,457,176	87.82

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100.00	100	100.00	474,660,000	460,741,121	97.07
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100.00	100	100.00	161,026,000	146,300,000	90.85
14	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	100	100.00	161,026,000	146,300,000	90.85
15	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100.00	100	100.00	97,632,000	91,575,200	93.80
16	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.00	100	100.00	32,886,000	28,855,200	87.74
17	Terseleenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.00	100	100.00	64,746,000	62,720,000	96.87
18	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100.00	100	100.00	29,880,000	29,280,000	97.99
19	Terseleenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	100	100.00	26,820,000	26,465,000	98.68
20	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100.00	100	100.00			
21	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pelayanan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	100	100.00			
22	Terseleenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.00	100	100.00	3,060,000	2,815,000	91.99

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100.00	100	100.00	99,650,000	99,353,000	99.70
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100.00	100	100.00	99,650,000	99,353,000	99.70
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100.00	100	100.00			
26	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	100	100.00			
27	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik	100.00	100	100.00			
28	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00	100	100.00	20,075,000	16,449,900	81.94
30	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00	100	100.00	913,900,920	888,727,870	97.25
31	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00	100	100.00			
32	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	10.00	10	100.00			
33	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	100	100.00			
34	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	100	100.00	83,975,000	82,945,600	98.77

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00	100	100.00			
36	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	100.00	100	100.00			
37	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	100	100.00			
38	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	100	100.00			
39	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00	4	100.00	10,152,000	3,570,000	35.17
40	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.00	1	50.00	200,000,000	200,000,000	100.00
41	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	5	100.00	619,773,920	602,212,270	97.17
42	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	5	100.00			
44	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00	100	100.00	729,563,420	701,796,428	96.19
45	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00	100	100.00			

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Mudah diakses	10.00	10	100.00			
47	Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100.00	100	100.00			
48	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100.00	100	100.00	8,980,000	7,018,500	78.16
49	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100.00	100	100.00			
50	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminstrasi Umum Perkantoran	100.00	100	100.00			
51	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100.00	100	100.00			
52	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100.00	100	100.00			
53	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00	4	100.00	5,645,000	0	0.00
54	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.00	2	100.00	200,000,000	199,727,300	99.86
55	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00	5	100.00	514,938,420	495,050,628	96.14

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 memiliki target sebesar 95 dengan realisasi sebesar 89,02 dan perolehan capaian sebesar 93,71%, dengan predikat **Sangat Tinggi**.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan Tahun 2025 memiliki target sebesar 97 dengan realisasi sebesar 95,42 dan perolehan capaian sebesar 98,37% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 memiliki target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 76,82 dan perolehan capaian sebesar 96,03% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tercapainya target kinerja untuk masing- masing indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target indikator sasaran strategis Kecamatan Gambut Tahun 2025.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Gambut agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan guna peningkatan nilai SAKIP.

3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Gambut maupun dengan pihak diluar Kecamatan Gambut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gambut ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Gambut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.

Gambut, 23 Februari 2026
Camat Gambut



Ahmad Fauzan, S.STP, M.Si.
NIP. 19801125 200012 1 003

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2025
[https://drive.google.com/drive/folders/1WeBkK_bW5JBdW1BSoy6eAEuM7m9WN6KH?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1WeBkK_bW5JBdW1BSoy6eAEuM7m9WN6KH?usp=drive_link)
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gambut Tahun 2025
<https://drive.google.com/drive/folders/1MJDF7ccpu2tiMk5IOEiXvv0AuaipRCKm?usp=sharing>